ISSN 2962-4177

Lensa Pembangunan

BULETIN

EDISI 2 APRIL - JUNI 2026

MENUMBUHKAN KALTARA DENGAN SINERGI INVESTASI DAN PENGUATAN UMKM



SCAN ME

ISSN 2962-4177

SOCIAL MEDIA
BAPPERIDA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA



Follow



BAPPERIDA.KALTARA

BAPPERIDAPROV.KALIMANTANUTARA

BAPPERIDA.KALTARAPROV.GO.ID

KATA PENGANTAR



Selamat Datang di Lensa Pembangunan

Kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar perencanaan dan inovasi daerah di Kalimantan Utara serta berbagai informasi lainnya yang sayang untuk dilewatkan.

Salam hangat dari redaksi Lensa Pembangunan.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat-Nya, sehingga Buletin Lensa Pembangunan edisi kedua tahun 2026 dapat kembali hadir menyapa para pembaca.

Tema yang kami angkat bukan sekadar judul. Menumbuhkan Kaltara Dengan Sinergi Investasi dan Penguatan UMKM. Di sini, koordinat geografis yang strategis bertemu dengan kekayaan bumi yang melimpah dan regulasi yang membuka pintu lebar-lebar bagi dunia usaha. Sebuah konvergensi yang langka, dan Kaltara memilikinya.

Edisi ini juga merekam denyut perencanaan pembangunan. Dialog dengan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Konreg PDRB Kasulampua, RAD Pangan dan Gizi, hingga Musrenbang RKPD 2027. Semua bermuara pada satu pertanyaan besar, bagaimana Kaltara menyiapkan diri menyongsong Indonesia Emas 2045?

Dan di antara data dan kebijakan, kami menyisipkan ruang untuk kekaguman, rubrik Inovasi Daerah, Muatan Lokal dan Jelajah, tempat Anda menemukan Kaltara dalam wujudnya yang paling memesona.

Semoga setiap halaman menjadi pemantik diskusi dan penyemangat langkah. Selamat menikmati bacaan.

Bertius

DAFTAR ISI









TOPIK UTAMA 07
Kalimantan Utara: Gerbang Investasi Baru Indonesia Di Kawasan Perbatasan

UMKM NAIK KELAS 12
Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Daerah

DIALOG TOKOH 14
H. Denny Harianto SE., MM
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Kemasan Ramah Lingkungan 21
Bioplastik, Industri Mikro-Kecil, dan Jalan Panjang Menuju Indonesia Bebas Sampah Plastik 2040

Konreg PDRB KASULAMPUA 24
Forum strategis 19 provinsi di Tanjung Selor lahirkan Kesepakatan Benuanta

RAD Pangan dan Gizi: 27
Pondasi Menuju Kaltara Sehat dan Sejahtera

Kaltara Mantapkan Langkah 28
Menuju *Universal Health Coverage* Berkualitas

Kolaborasi dan Data Terintegrasi Jadi Kunci 34
Percepatan Penurunan Stunting di Kalimantan Utara

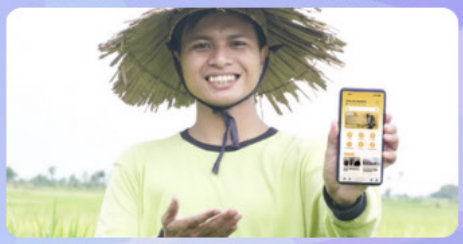
REDAKTUR **BERTIUS**
EDITOR **MOCHAMAD SARKAWI, LINDA MARLISA**
PENULIS **TIM PENULIS**
DESAIN GRAFIS **ADY SETIAWAN, CRISTOVE DISMOND**
ALAMAT REDAKSI **JL. AGATISH TJ. SELOR, KABUPATEN BULUNGAN, KALIMANTAN UTARA**

Bapperida_kaltara
Bapperidaprov_kalimantanutara
Bapperidaprovkaltara
Bapperida_kaltaraprov.go.id











Dialog Kebijakan 36
Penyampaian *Policy Brief*:
Isu Strategis Kelompok Rentan

Pembahasan Ranhir RKPD 2027 44
Memastikan program selaras RPJMD 2025—2029

Bimtek Inovasi Daerah 50
Mempersiapkan inovasi terbaik perangkat daerah menuju *Innovative Government Award* (IGA) 2026.

INOVASI DAERAH 53
Pemenang Inovasi Daerah tahun 2025

SEKILAS INFO 56
Informasi Singkat Kegiatan Bapperida

POTRET RUANG 58
Ketika Kurs Sampai ke Desa

JELAJAH 63
We Are The Traffic

MUATAN LOKAL 66
Kuliner Kaltara Berbahan Buah & Tanaman

Kalau kita semua mau membeli dan menggunakan produk lokal, ekonomi kita akan berdiri di atas kaki sendiri.

Dr. H. Zainal A. Paliwang S.H. M.Hum
Gubernur



INVESTMENT PROJECT READY TO OFFER

KALIMANTAN UTARA: GERBANG INVESTASI BARU INDONESIA DI KAWASAN PERBATASAN

Mengoptimalkan potensi daerah melalui investasi berkelanjutan dari food estate, hilirisasi industri, hingga infrastruktur konektivitas baru.

75.467
KM² LUAS WILAYAH,
4 KABUPATEN & 1 KOTA

572 RB
HEKTAR PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT

3 JUTA
PROYEKSI PENDUDUK KALTARA
PADA 2031

Kalimantan Utara sedang berada pada momentum pertumbuhan yang sangat menjanjikan. Lokasi strategis, sumber daya alam, dan kemudahan berusaha menyatu menjadi destinasi investasi paling prospektif di Indonesia.

Mengoptimalkan Potensi Daerah Melalui Investasi

PROVINSI KALIMANTAN UTARA - KAWASAN PERBATASAN STRATEGIS

Provinsi Kalimantan Utara terus menunjukkan transformasi yang signifikan sebagai salah satu wilayah strategis yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Sebagai provinsi muda yang berada di wilayah perbatasan langsung dengan Malaysia, Kalimantan Utara memiliki posisi sangat strategis sebagai pintu gerbang perdagangan internasional, pusat pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus simpul konektivitas kawasan Asia Pasifik.

Dengan luas wilayah mencapai 75.467 kilometer persegi yang terdiri atas empat kabupaten dan satu kota, Kalimantan Utara memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, energi, hingga industri pengolahan. Didukung jumlah penduduk yang terus bertumbuh, Kaltara memiliki prospek pasar yang menjanjikan bagi dunia usaha dan investasi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan, penyediaan infrastruktur pendukung, pemberian insentif daerah, serta penguatan sinergi pemerintah dan pelaku usaha. Komitmen ini diwujudkan melalui proyek-proyek strategis dalam skema *Investment Project Ready to Offer (IPRO).*

PROYEK 01 - BULUNGAN

Delta Kayan *Food Estate*: Lumbung Pangan Masa Depan

Delta Kayan Food Estate (DEKAFE) di Kabupaten Bulungan dipersiapkan sebagai pusat pertanian terpadu yang menggabungkan budidaya, pengolahan hasil pertanian, hingga pemasaran produk dalam satu rantai nilai terintegrasi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten Bulungan telah menyediakan lokasi pengembangan *food estate* sejak tahun 2011, dengan luasan awal mencapai 50.000 Ha yang kini menjadi 41.000 Ha. Lahan relatif datar dan didukung sistem aliran Sungai Kayan yang menjamin ketersediaan air sepanjang tahun, menjadikan kawasan ini ideal untuk komoditas strategis seperti padi, jagung, cabai, serta hortikultura.

Pengembangan DEKAFE diarahkan membangun kawasan agroindustri modern penghasil produk bernilai tambah tinggi, menjadi pusat ketahanan pangan regional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja.

PROYEK 02 - TANAH KUNING

Hilirisasi Industri CPO: Nilai Tambah Komoditas Unggulan

Sebagai daerah penghasil kelapa sawit dengan produksi ratusan ribu ton per tahun, Kalimantan Utara memiliki peluang besar mengembangkan industri hilirisasi *Crude Palm Oil (CPO)* di kawasan Tanah Kuning, Bulungan.

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT KALTARA	
Total luas perkebunan	**572 ribu Ha**
Perkebunan swasta	**497,5 ribu Ha**
Perkebunan rakyat	**74,5 ribu Ha**

Proyek ini semakin menarik karena berada di kawasan terintegrasi dengan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) pada jalur strategis Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, salah satu jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia. Investasi hilirisasi CPO membuka peluang produk turunan seperti oleokimia, bahan baku industri pangan, kosmetik, hingga energi terbarukan, didukung Pelabuhan Internasional dan pasokan energi PLTA Kayan berkapasitas besar.

Mengoptimalkan Potensi Daerah Melalui Investasi

TARAKAN · BULUNGAN · TANJUNG SELOR

PROYEK 03 - TARAKAN

Industri Perikanan dan Pelabuhan Tarakan

Sebagai wilayah kepulauan yang dikelilingi perairan kaya sumber daya laut, Kalimantan Utara memiliki potensi besar pada sektor perikanan. Kota Tarakan menjadi salah satu pusat produksi perikanan terbesar dengan potensi tangkap dan budidaya yang terus berkembang setiap tahunnya.

Namun besarnya produksi tersebut belum sepenuhnya diimbangi infrastruktur pengolahan dan distribusi memadai. Karenanya, pembangunan Kawasan Industri Perikanan dan Pelabuhan Kota Tarakan menjadi proyek strategis yang ditawarkan kepada investor, mendukung pelelangan ikan, *cold storage*, pergudangan, pengolahan hasil laut, hingga ekspor.

POTENSI PRODUKSI PERIKANAN 2025	
Perikanan budidaya	883.068 ton
Perikanan tangkap	30.575 ton
Budidaya rumput laut	867.357 ton

Lokasi yang dekat dengan Bandara Juwata serta kedalaman laut yang memadai menjadikan kawasan ini sangat potensial sebagai pusat logistik perikanan di wilayah utara Indonesia, sekaligus memperkuat daya saing produk perikanan Kaltara di pasar nasional maupun internasional.

PROYEK 04 - KOMODITAS BIRU

Hilirisasi Rumput Laut: Peluang Emas Komoditas Biru

Rumput laut merupakan komoditas unggulan Kaltara dengan prospek cerah di pasar global. Produksinya terus meningkat signifikan dari tahun ke tahun, namun sebagian besar masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah bagi petani relatif terbatas.

Pemerintah Provinsi mendorong pembangunan industri pengolahan rumput laut yang menghasilkan produk setengah jadi maupun produk jadi bernilai tinggi, meningkatkan kesejahteraan petani melalui stabilitas harga dan kepastian pasar, sekaligus memperluas peluang ekspor.

> *Bandar Udara Hijau Sajau dirancang dengan landasan pacu sepanjang 4.000 meter, mampu melayani penerbangan domestik maupun internasional sebagai pintu gerbang utama Kalimantan Utara.*

PROYEK 05 - BULUNGAN

Bandar Udara Hijau Sajau & Jalan Pendekat Tanjung Selor–Tanah Kuning

Bandara ini akan mendukung aktivitas ekonomi Kawasan Industri Hijau Indonesia serta memperkuat konektivitas dengan pusat ekonomi nasional dan internasional, dijangkau dari Nunukan, Malinau, Tana Tidung, dan Berau, serta terhubung rencana jalan tol menuju ibu kota provinsi.

Jalan Pendekat Tanjung Selor–Tanah Kuning sepanjang 61 kilometer menjadi urat nadi penghubung ibu kota provinsi dengan KIHI, mempercepat mobilitas manusia dan barang, mengurangi biaya logistik, serta membuka akses pemerataan pembangunan bagi masyarakat sekitar dengan 23 titik jembatan, 1 jembatan layang, dan 1.220 titik lampu jalan tenaga surya, serta proyeksi pendapatan tahunan sebesar USD 15 juta.



Investasi Kesehatan & Optimisme Menuju Masa Depan Berkelanjutan

TANJUNG SELOR

PROYEK 06 -TANJUNG SELOR

Rumah Sakit Tipe B: Investasi untuk Masa Depan Kesehatan

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus diimbangi peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk bidang kesehatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menawarkan peluang investasi pembangunan Rumah Sakit Tipe B di Tanjung Selor sebagai pusat layanan kesehatan rujukan regional dengan fasilitas medis modern.

Saat ini Kabupaten Bulungan hanya memiliki satu Rumah Sakit tipe C yang menjadi rujukan daerah sekitarnya. Pemerintah daerah berharap hadirnya Rumah Sakit tipe B dengan layanan lebih memadai dan cepat, mengingat pasar yang besar dari daerah sekitar, termasuk penduduk Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

PROYEKSI DAMPAK INVESTASI RS TIPE B

Jiwa yang akan terlayani	± 400.000 jiwa
Efisiensi biaya layanan kesehatan	30%
Proyeksi penduduk Kaltara 2031	3 juta jiwa

Investasi di bidang kesehatan ini akan mampu meningkatkan perekonomian daerah, seiring pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) di Bulungan yang mendorong proyeksi pertumbuhan penduduk Kaltara mencapai 3 juta jiwa pada tahun 2031.

Optimisme Menuju Masa Depan

Berbagai proyek investasi yang ditawarkan menunjukkan bahwa Kalimantan Utara sedang berada pada momentum pertumbuhan yang sangat menjanjikan. Kombinasi lokasi strategis, ketersediaan sumber daya alam, dukungan infrastruktur, serta komitmen pemerintah dalam menciptakan kemudahan berusaha menjadikan Kalimantan Utara sebagai salah satu destinasi investasi paling prospektif di Indonesia.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, investasi yang masuk tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (NF)

Kalimantan Utara tidak hanya menawarkan peluang investasi, tetapi juga menghadirkan kesempatan untuk menjadi bagian dari pembangunan masa depan Indonesia dari wilayah perbatasan yang terus tumbuh dan berkembang.



Generasi muda bisa menjadi bagian dari solusi untuk memperkuat ekonomi daerah, termasuk melalui promosi pariwisata dan branding UMKM agar semakin dikenal, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga hingga mancanegara.

Ingkong Ala, S.E., M.Si.,
Wakil Gubernur

UMKM NAIK KELAS

Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Strategi, Potensi, dan Transformasi Digital UMKM Kalimantan Utara

51.840	99,3 %	5
Unit UMKM di Kaltara	Porsi Usaha Mikro	Kabupaten/Kota

01 UMKM: PILAR EKONOMI KALIMANTAN UTARA

51.840 unit usaha tersebar di lima kabupaten/kota

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian Kalimantan Utara — penyerap tenaga kerja sekaligus penggerak aktivitas ekonomi hingga ke wilayah perbatasan dan pedesaan. Total 51.840 UMKM tersebar di lima kabupaten/kota, didominasi 51.460 usaha mikro (99,3%). Dominasi ini menunjukkan potensi besar yang masih perlu dikembangkan. Sebanyak 333 usaha kecil dan 47 usaha menengah melengkapi ekosistem UMKM Kaltara. Meskipun jumlahnya kecil, segmen ini menjadi target utama pengembangan agar lebih banyak usaha mikro dapat naik ke tangga berikutnya.

Sebaran UMKM per Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara

No	Kabupaten/Kota	Mikro	Kecil	Menengah	Total
1	Malinau	6.135	82	6	6.223
2	Bulungan	9.597	44	3	9.644
3	Tana Tidung	3.028	27	3	3.058
4	Nunukan	15.688	150	25	15.863
5	Tarakan	17.012	30	10	17.052
	Total	**51.460**	**333**	**47**	**51.840**

Sumber: Data UMKM Provinsi Kalimantan Utara



02 APA ITU UMKM NAIK KELAS?

Transformasi menyeluruh, bukan sekadar peningkatan skala

Naik kelas bukan hanya soal bertambahnya omzet atau skala usaha. Konsep ini mencerminkan transformasi usaha secara menyeluruh melalui enam dimensi utama:

① Peningkatan kualitas produk ② Penguatan tata kelola ③ Kepemilikan legalitas & perizinan ④ Pemenuhan standar mutu & sertifikasi ⑤ Pemanfaatan teknologi digital ⑥ Perluasan akses

pembiayaan & pasar. Dengan kapasitas usaha yang semakin baik, UMKM diharapkan menghasilkan nilai tambah lebih tinggi, meningkatkan produktivitas, dan memperluas kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

> *"Naik kelas bukan hanya soal omzet , ini tentang transformasi menyeluruh cara berusaha"*

03 POTENSI KOMODITAS & SINERGI PEMANGKU KEPENTINGAN

Dari madu hutan hingga pasar internasional

Kalimantan Utara kaya komoditas unggulan. Hasil perikanan, rumput laut, udang, madu hutan, kopi, kakao, hingga kerajinan berbasis budaya lokal. Melalui inovasi produk, kemasan berkualitas, dan strategi pemasaran modern, sebagian produk UMKM Kaltara telah memasuki pasar nasional dan internasional. Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memfasilitasi NIB, sertifikasi halal, sertifikasi keamanan pangan, pelatihan, pendampingan, akses pembiayaan, dan promosi melalui pameran serta *business matching*.

Kolaborasi dengan lembaga keuangan, perguruan tinggi, dunia usaha, dan komunitas pendamping terus diperkuat agar pembinaan berjalan berkelanjutan.

04 TRANSFORMASI DIGITAL: KUNCI DAYA SAING

Marketplace dan media sosial membuka pasar tanpa batas

Di era digital, pemanfaatan media sosial, *marketplace,* dan *platform e-commerce* memberi kesempatan memasarkan produk tanpa batas wilayah geografis. Digitalisasi juga membantu meningkatkan efisiensi usaha, memperkuat identitas merek, memahami preferensi konsumen, dan membangun jejaring bisnis yang lebih luas. Kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi menjadi modal utama bagi UMKM untuk tetap kompetitif dan relevan.

05 DAMPAK & ARAH KE DEPAN

Pertumbuhan inklusif yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat



UMKM yang naik kelas memberikan dampak signifikan yaitu mendorong produktivitas, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penguatan rantai pasok komoditas unggulan daerah. Berkembangnya UMKM meningkatkan nilai tambah produk lokal, mengurangi ketergantungan pada produk luar daerah sekaligus memperkuat daya saing ekonomi Kaltara.

Ke depan, pengembangan UMKM naik kelas terus diarahkan pada peningkatan SDM, penguatan inovasi, perluasan akses pembiayaan, transformasi digital, dan kemitraan dengan industri hingga UMKM Kaltara menjadi bagian rantai pasok nasional dan global. (AA)

Keberhasilan UMKM naik kelas bukan hanya diukur dari omzet, tetapi dari semakin besarnya kontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Wawancara Eksklusif

Menumbuhkan Kaltara Lewat Sinergi Investasi dan Penguatan UMKM

Gagasan besar di balik program Sinergi Kaltara dan upaya mengoptimalkan keterhubungan 51.840 UMKM dengan gelombang investasi strategis yang masuk ke Kalimantan Utara.

H. Denny Harianto, S.E., M.M
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Menyongsong edisi kedua buletin dengan tema "Menumbuhkan Kaltara dengan Sinergi Investasi dan Penguatan UMKM", redaksi berkesempatan mewawancarai Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Wawancara ini digagas untuk menggali gagasan besar di balik program Sinergi Kaltara, sebuah proyek perubahan yang lahir dari keresahan atas belum optimalnya keterhubungan antara pelaku UMKM dan gelombang investasi strategis yang masuk ke Kalimantan Utara, termasuk kedekatan geografis dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Kawasan Industri Tanah Kuning. Berikut petikan wawancaranya.

Data Kunci Ekonomi Kalimantan Utara

51.840	Rp30T	3,2%
UNIT UMKM	NILAI INVESTASI	PERTUMBUHAN PDRB
Tercatat di Kalimantan Utara	Naik dari Rp11T (2024→2025)	Tidak sebanding lonjakan investasi

> *Kita tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah pertumbuhan investasi yang terjadi di halaman rumah kita sendiri.*
>
> — Denny Harianto



P1 **Bagaimana Bapak memandang posisi dan peran strategis UMKM dalam transformasi ekonomi Kaltara, di tengah pesatnya perkembangan investasi strategis dan kawasan industri?**

UMKM adalah kekuatan yang telah teruji. Sejak masa krisis moneter hingga pandemi, UMKM tetap memberikan kontribusi nyata dan tidak terlalu terpengaruh oleh gejolak kondisi apa pun. Ini semestinya menjadi peluang besar bagi kita.

Namun, data menunjukkan hal yang perlu menjadi perhatian bersama: nilai investasi di Kalimantan Utara melonjak signifikan dalam kurun 2024 hingga 2025. Menurut data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dari sekitar Rp 11 triliun menjadi sekitar Rp 30 triliun. Sayangnya, lonjakan itu tidak dibarengi kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang signifikan, yang hanya tumbuh sekitar 3,2 persen.

Ini menandakan ada kebocoran ekonomi ke luar daerah yang harus segera kita intervensi. Karena itu, kita perlu memetakan secara serius di mana dan seperti apa sebaran 51.840 UMKM yang ada di Kalimantan Utara, agar mereka bisa terhubung dengan peluang yang tersedia

P2 **Mengapa integrasi rantai nilai antara UMKM dan industri menjadi urgensi yang perlu segera diwujudkan dalam pembangunan daerah saat ini?**

Karena kebutuhan riil di kawasan industri seperti Kawasan Industri Tanah Kuning itu sangat besar, dan sebagian besar justru masih dipasok dari luar Kalimantan Utara, dari Jawa, Kalimantan Timur, hingga Sulawesi.

Sebagai gambaran, dengan puluhan ribu tenaga kerja di kawasan tersebut, kebutuhan barang dan jasa penunjang seperti seragam kerja saja sudah sangat besar, namun belum banyak tertangkap oleh UMKM lokal. Kalau kondisi ini dibiarkan, potensi kebocoran ekonomi ke luar daerah akan terus membesar. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah pertumbuhan investasi yang terjadi di halaman rumah kita sendiri.

Asal Pasokan Kawasan Industri Kaltara

Sebagian besar kebutuhan masih dipasok dari luar daerah:

- Jawa — pangan, konveksi, manufaktur ringan
- Kalimantan Timur — material bangunan, logistik
- Sulawesi — kebutuhan pangan tertentu
- UMKM Lokal — belum banyak tertangkap peluang

P3 **Seperti apa gambaran ekosistem UMKM-industri yang ideal menurut Bapak, yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara secara inklusif dan berkelanjutan?**

Ekosistem ideal itu membalik cara kerja yang selama ini terjadi. Selama ini UMKM yang mendatangi industri dan bertanya, 'Saya punya ini, apakah dibutuhkan?'

Seharusnya sebaliknya: industri yang menyampaikan kebutuhannya secara spesifik, standarnya seperti apa, volumenya berapa, lalu pemerintah hadir menyiapkan dan memfasilitasi UMKM agar mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi bukan UMKM yang bertanya 'Anda butuh apa dari saya?', tapi pemerintah dan industri yang menyampaikan kebutuhan, dan kita yang menyiapkan pasokannya.

P4 **Apa tantangan utama yang masih menjadi penghambat UMKM Kalimantan Utara untuk dapat terhubung dan masuk ke dalam rantai pasok industri?**

Ada banyak kendala yang saling berkaitan: kapasitas produksi yang masih terbatas, konsistensi kualitas dan ketepatan waktu pengiriman yang belum terjaga, sebaran lokasi UMKM yang jauh dari kawasan industri, misalnya di Nunukan sementara kawasan industri berada di Tanah Kuning, belum terpenuhinya standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta standar lingkungan dan mutu, legalitas usaha yang belum lengkap, keterbatasan modal kerja dan kemampuan administrasi, keterbatasan teknologi dan peralatan, harga jual yang belum kompetitif, hingga ketersediaan bahan baku yang belum stabil. Semua ini menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus kita selesaikan bertahap.

P5 **Sejauh mana kapasitas UMKM lokal saat ini telah mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk atau layanan?**

Saat ini masih belum banyak, jujur saja belum bisa bicara terlalu banyak. Sebagai contoh, kebutuhan daging babi di pasar lokal cukup tinggi, namun kemampuan peternak kita, meski digabungkan seluruh peternak yang ada, masih menghadapi kendala daya saing harga karena biaya pakan ternak yang mahal membuat harga jual tidak kompetitif dibanding pasokan dari luar daerah. Di sinilah pemerintah semestinya hadir, misalnya lewat subsidi dari dinas pertanian atau dorongan inovasi pakan ternak alternatif, agar daya saing harga UMKM lokal bisa setara dengan pasokan dari luar.

P6 **Hambatan apa yang paling kritis dari aspek regulasi, pembiayaan, teknologi, dan sumber daya manusia yang perlu mendapat perhatian lintas sektor?**

Dari sisi pembiayaan, kami menyadari *non performing loan* atau kredit bermasalah di segmen UMKM memang relatif tinggi dibanding segmen lain. Pendekatan kami adalah memetakan dulu kebutuhan riil industri, misalnya di Kawasan Industri Tanah Kuning, lalu menyiapkan UMKM dengan cara berpikir yang lebih terbuka dan berorientasi jangka panjang, tidak sekadar 'yang penting laku' dengan modal seadanya.

Kami juga mendorong konsolidasi antar pelaku, misalnya membangun kesepahaman awal antara penyedia modal dan kelompok UMKM sejenis, sebagai langkah bertahap sesuai kemampuan, sambil terus memetakan persoalan mana yang paling mendesak untuk segera diselesaikan.

P7 **Kebijakan dan langkah strategis apa yang sedang atau akan dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk memperkuat keterhubungan UMKM dengan sektor industri?**

Melalui Sinergi Kaltara, kami menyusun tahapan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Langkah pertama yang kami pastikan adalah membentuk Forum Koordinasi Multipihak (FKM) yang mempertemukan pemerintah, industri, dan pelaku UMKM dalam satu wadah. Setelah itu, kami akan melakukan pemetaan kebutuhan rantai pasok kawasan industri sekaligus profil UMKM kita. Target kami tidak muluk-muluk di awal, yang penting semua pihak hadir dulu, baru kita bicarakan langkah selanjutnya secara bertahap dan berkelanjutan.

> *"Bukan UMKM yang bertanya 'Anda butuh apa dari saya?' Tapi pemerintah dan industri yang menyampaikan kebutuhan, dan kita yang menyiapkan pasokannya.*

P8 **Bagaimana bentuk konkret kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, kampus, dan komunitas lokal dalam membangun ekosistem UMKM-industri yang solid?**

Forum Koordinasi Multipihak (FKM) itu nantinya akan diperkuat dengan payung hukum, ke depan kami menargetkan bentuknya berupa Peraturan Gubernur, agar program ini tidak berhenti sekadar sebagai semangat dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, tetapi benar-benar berdampak dan berkelanjutan, tidak terhenti karena pergantian pucuk pimpinan.

P9 **Apakah terdapat upaya atau mekanisme khusus untuk mendorong industri dan investor yang beroperasi di Kalimantan Utara agar lebih banyak melibatkan UMKM lokal dalam rantai pasoknya?**

Kami ingin membangun kemitraan dan komitmen bersama terlebih dulu, mempertemukan pemerintah, kawasan industri, dan UMKM sebagai satu kekuatan yang saling terhubung. Soal insentif, kami masih mengkaji bentuknya, tidak harus berupa materi, bisa saja berupa kemudahan-kemudahan tertentu.

Yang jelas, dukungan konkret sudah kami siapkan lewat APBD Tahun Anggaran 2026 dengan anggaran penguatan UMKM sekitar Rp71,33 miliar yang tersebar di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), ditambah fasilitas rumah kemasan dan kebijakan afirmasi penggunaan produk lokal, misalnya batik Kaltara.



Sektor Unggulan untuk Dikembangkan

- Pangan & Peternakan — kebutuhan kawasan industri
- Konveksi / Garmen — seragam kerja puluhan ribu TK
- Kerajinan & Olahan Khas — produk budaya daerah
- Pariwisata — hutan mangrove & bekantan

P10 **Sejauh mana kapasitas UMKM lokal saat ini telah mampu memenuhi kebutuhan industri Dengan berkembangnya investasi strategis di Kaltara, termasuk kedekatan geografis dengan IKN dan KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi, peluang konkret apa yang paling realistis dapat dimanfaatkan oleh UMKM lokal dalam waktu dekat?**

Dengan puluhan ribu tenaga kerja yang akan terus bertambah di kawasan industri, kebutuhan penunjang sehari-hari sangat besar, mulai dari kebutuhan pangan hingga seragam kerja, yang selama ini masih banyak dipasok dari luar daerah. Kalau UMKM kita terorganisir dan kapasitasnya dipetakan dengan baik melalui platform Sinergi Kaltara, peluang ini bisa ditangkap dalam waktu dekat.

P11 **Sektor atau komoditas unggulan apa yang menurut Bapak paling potensial untuk dikembangkan melalui kemitraan UMKM dan industri di Kalimantan Utara?**

Sektor pangan dan peternakan, konveksi atau garmen untuk kebutuhan seragam kerja kawasan industri, serta produk kerajinan dan olahan khas daerah adalah beberapa yang paling dekat dengan kebutuhan riil saat ini. Ke depan, pariwisata juga akan menjadi satu paket pengembangan lanjutan, mengingat Kalimantan Utara punya potensi alam yang luar biasa, seperti hutan mangrove dan bekantan, yang belum tergarap maksimal.

P12 **Bagaimana peran inovasi, digitalisasi, dan hilirisasi dalam meningkatkan daya saing dan kapasitas UMKM Kaltara agar mampu naik kelas dan bersaing di pasar yang lebih luas?**

Sektor pangan dan peternakan, konveksi atau garmen untuk kebutuhan seragam kerja kawasan industri, serta produk kerajinan dan olahan khas daerah adalah beberapa yang paling dekat dengan kebutuhan riil saat ini. Ke depan, pariwisata juga akan menjadi satu paket pengembangan lanjutan, mengingat Kalimantan Utara punya potensi alam yang luar biasa, seperti hutan mangrove dan bekantan, yang belum tergarap maksimal.

P13 **Model kolaborasi seperti apa yang menurut Bapak paling efektif untuk memastikan UMKM dan industri dapat tumbuh bersama secara sinergis dan saling menguntungkan?**

Setiap pihak harus fokus menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, namun tetap terhubung dalam satu arah yang sama. Sebagai Sekda, tugas saya adalah mengoordinasikan dan mengintegrasikan semua pihak agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Setiap rupiah APBD yang digunakan harus benar-benar bermanfaat dan menghasilkan dampak yang terasa, bukan sekadar kegiatan seremonial tanpa keberlanjutan.

Ekosistem Platform Sinergi Kaltara

- Pemerintah — fasilitator & koordinator
- Kawasan Industri — sampaikan kebutuhan spesifik
- 51.840 UMKM — penyedia pasokan lokal
- Lembaga Keuangan — pembiayaan konsolidatif
- Perguruan Tinggi — riset & inovasi produk

P14 **Apakah diperlukan suatu *platform* atau kelembagaan khusus yang berfungsi sebagai penghubung dan fasilitator antara UMKM, industri, pemerintah, dan lembaga pendukung lainnya?**

Ya, itulah yang sedang kami bangun melalui forum koordinasi multipihak dan *platform* digital Sinergi Kaltara sebagai penghubung. Detail teknis platform ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh tim kami, tetapi semangatnya jelas, dampaknya tidak berhenti di Kalimantan Utara saja. Saya berharap model Sinergi Kaltara ini bisa direplikasi oleh provinsi lain di Indonesia, tentu dengan penyesuaian terhadap potensi dan kultur masing-masing daerah.



P15 **Bagaimana Pemerintah Provinsi memastikan bahwa manfaat investasi yang masuk dapat dirasakan secara nyata dan merata oleh pelaku UMKM dan masyarakat lokal?**

Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan penjembatan, sementara UMKM tetap menjadi pelaku utama. Keberhasilan program ini akan kami evaluasi dari respons nyata di lapangan: berapa banyak UMKM yang merespons platform ini, berapa banyak kebutuhan industri yang tersampaikan dan terpenuhi, hingga transaksi riil yang terjadi antara UMKM dan industri. Itu semua akan menjadi indikator bahwa kita sudah berada di jalur yang benar.

P16 **Apa harapan dan target konkret Bapak terhadap perkembangan UMKM Kalimantan Utara dalam lima tahun ke depan?**

Saya berharap UMKM kita semakin naik kelas, mampu menggali seluruh potensi yang mereka miliki, menangkap peluang yang ada, dan berdaya saing lebih tinggi. Mereka tidak boleh puas hanya dengan capaian saat ini, karena pasar yang tersedia jauh lebih luas. Cita-cita besar saya, UMKM Kalimantan Utara mampu menembus pasar internasional, sebagaimana sudah dilakukan sejumlah UMKM di Jawa Timur, misalnya dengan produk minyak kelapa.

> **UMKM kita harus berani mengubah cara berpikir, tidak lagi sekadar berorientasi pasar lokal, tetapi mempersiapkan diri untuk bersaing lebih luas.**

P17 **Pesan dan arahan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pelaku UMKM Kaltara agar mampu naik kelas dan menjadi bagian aktif dari rantai nilai industri?**

Dari 51.840 UMKM yang tercatat di Kalimantan Utara, saya ingin mereka hadir bukan sekadar sebagai label atau angka statistik, tetapi benar-benar berkontribusi nyata. Fokuslah menyelesaikan satu persoalan utama terlebih dulu sebelum melebar ke banyak hal. Forum koordinasi multipihak dan platform Sinergi Kaltara sudah kami siapkan sebagai wadah, sekarang giliran pelaku UMKM untuk merespons dengan aktif. Pemerintah akan memfasilitasi dan menjembatani, tetapi pelaku utamanya tetap UMKM itu sendiri.

P18 **Jika Bapak harus menyampaikan satu pesan utama kepada seluruh pemangku kepentingan terkait penguatan ekosistem sinergi UMKM dan industri di Kaltara, apa pesan tersebut?**

Harapan besar saja tidak cukup kalau tidak dibarengi tindakan nyata dan tindak lanjut yang konkret. Semua pihak harus hadir dan menjalankan perannya masing-masing, siapa melakukan apa dan bertanggung jawab atas apa, itu penting bagi saya. Kita tidak bisa hanya berdiskusi tanpa *follow up.* Ukuran keberhasilan yang paling sederhana adalah ketika sudah ada transaksi nyata antara UMKM dan industri. Pada akhirnya, kesejahteraan UMKM yang membaik akan berdampak langsung pada pendapatan asli daerah dan perekonomian Kalimantan Utara secara keseluruhan.

“Harapan besar saja tidak cukup kalau tidak dibarengi tindakan nyata dan tindak lanjut yang konkret. Ukuran keberhasilan yang paling sederhana adalah ketika sudah ada transaksi nyata antara UMKM dan industri. Pada akhirnya, kesejahteraan UMKM yang membaik akan berdampak langsung pada pendapatan asli daerah dan perekonomian Kalimantan Utara secara keseluruhan.

— Denny Harianto

KEMASAN RAMAH LINGKUNGAN

Bioplastik, Industri Mikro-Kecil, dan Jalan Panjang Menuju Indonesia Bebas Sampah Plastik 2040

4,5 juta	#3	2040
Unit Usaha IMK	Sampah Laut Dunia	Target Bebas Plastik

01 INDUSTRI MIKRO DAN KECIL DI INDONESIA

Tulang punggung perekonomian, bertahan di tengah krisis

Industri mikro dan kecil (IMK) di Indonesia pada tahun 2023 mencatat pangan, pakaian, dan kayu sebagai tiga besar. Total 4,5 juta unit usaha melibatkan 9,84 juta tenaga kerja dengan nilai pendapatan 615 miliar rupiah (BPS, 2025).

Sebanyak 66,35% penduduk Indonesia berada pada kelas Menengah dan Menuju Kelas Menengah, menyumbang 81,49% konsumsi nasional (BPS, 2024). Ini mendorong tumbuhnya industri makanan dari skala mikro (kuliner lokal, waralaba Indonesia), hingga pangan olahan kompleks. Diplomasi budaya Korea dan Jepang melalui drama seri turut mendorong penggalian kuliner lokal. Semua kalangan kini berkesempatan menjadi pelaku usaha makanan.

MK terbukti menjadi penyelamat ekonomi saat krisis moneter (krismon) dan COVID-19 (2019–2023). Ketika industri besar melakukan PHK, IMK justru berkembang pesat berkat bahan baku dan proses pengolahan lokal yang tidak terpengaruh gejolak global.

9,84 Juta
Tenaga Kerja IMK Nasional (2023)

"IMK adalah jangkar ekonomi yang tidak goyah saat badai besar melanda"

02 KEMASAN PRODUK IMK DAN DOMINASI PLASTIK
Dari penyelamat hutan menjadi ancaman lingkungan

Hampir semua produk makanan IMK dikemas dengan plastik. Bahan ini diperkenalkan Sten Gustaf Thulin sekitar 1950-an sebagai pengganti kantong kertas, dengan niat mulia menyelamatkan hutan (BBC, 2019).

Plastik disukai karena ringan, serbaguna, dan murah. Namun kemurahannya justru menjadi bumerang, orang tidak menghargainya, membuang setelah sekali pakai.

Plastik dibuat dari senyawa berbasis karbon dan hidrogen dari minyak bumi atau gas alam tidak dapat terurai alami (Bioplast, 2025). Meski penutupan Selat Hormuz sempat menaikkan harga, plastik tetap dominan sebagai kemasan.

Media sosial mempercepat tren kemasan menarik diposting siapa saja dan langsung ditiru. Siklus ini membuat permintaan plastik kemasan makanan IMK terus melonjak.

03 PLASTIK DAN INDONESIA
Krisis sampah yang mendesak diatasi

#3
Penghasil sampah laut terbesar di dunia

#5
Penghasil sampah darat terbanyak di dunia (2024)

Indonesia, sebagai negara berpopulasi terbesar keempat dunia, menjadi konsumen plastik raksasa. Mendagri menyampaikan data ini dalam Rakornas Pengelolaan Sampah, Jakarta, 25 Februari 2026 (Prihatini & Jatmiko, 2026).

Sampah plastik yang tidak terkelola mengalir melalui sungai ke lautan. Plastik tidak dapat terurai tampilannya menyerupai mangsa biota laut, mengakibatkan kematian satwa secara perlahan.

6 Mei 2026: JAAN memberitakan paus putih mati terdampar di Pantai Malaya, Lampung. Plastik adalah penyebabnya (JAAN, 2026).
19 Juni 2026: DW News memaparkan hasil penelitian penemuan mikroplastik pada air hujan di Jakarta. Reza Cordova (Peneliti Oseanografi) menyatakan ini berpotensi menjadi gangguan kesehatan (DW Indonesia, 2026).
Penanganan sampah di daratan menjadi kunci sampah darat yang terbawa sungai adalah sumber utama polusi plastik laut Indonesia.

04 PLASTIK KEMASAN RAMAH LINGKUNGAN
Bioplastik: inovasi lokal untuk masa depan hijau

Bioplastik adalah plastik berbahan selulosa (tumbuhan), singkong dan rumput laut menjadi bahan baku unggulan Indonesia. Ada yang bersifat edible (dapat dimakan) atau terurai dalam waktu singkat (Bioplast, 2025).

Produsen bioplastik Indonesia sudah hadir, namun pasarnya masih didominasi klien luar negeri. Peningkatan permintaan domestik akan mendorong efisiensi biaya dan penurunan harga. Pengenalan intensif bioplastik kepada IMK dapat menjadi strategi antara menuju komitmen Indonesia Bebas Sampah Plastik 2040 yang dicanangkan pada *World Economic Forum* di Davos, 20 Januari 2020 (Susanto, 2020).

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Tiga Pilar Strategi Menuju Indonesia Bebas Sampah Plastik 2040

01	02	03
EDUKASI MASYARAKAT	SISTEM PENGELOLAAN	KEMITRAAN DAN INSENTIF IMK

1. Edukasi Perilaku terhadap Sampah

Menyelenggarakan edukasi menyeluruh kepada masyarakat tentang tanggung jawab terhadap sampah plastik. Fokus utama pada pengguna produk IMK yang berada di segmen kelas menengah bergerak.

2. Sistem Pengolahan Sampah yang Sehat

Membangun infrastruktur daur ulang dan sortir sampah di seluruh wilayah. Ini adalah langkah mendasar yang paling mendesak, karena tanpa sistem pengolahan yang memadai, edukasi saja tidak akan cukup.

3. Kemitraan Produsen Bioplastik + Insentif IMK

Sebagai strategi antara: berkolaborasi dengan produsen bioplastik untuk memperkenalkan produk kepada IMK, disertai insentif berupa pendanaan langsung, keringanan pajak, atau akses pemasaran.

"Edukasi, sistem, dan insentif – tiga kunci membuka pintu Indonesia Hijau 2040"





Penulis :Rina Susanti, S.Hut., M.Sc.
Penelaah Teknis Kebijakan Bapperida Kaltara

Referensi

- *BPS (2024, 2025) Statistik Indonesia ·*
- *Bioplast (2025) Mengenal Bahan Dasar Plastik dan Proses Pembuatannya*
- *BBC (2019) Sampah Plastik Ilegal Penyebab Dioksin di Sampel Telur Ayam Jawa Timur*
- *DW Indonesia (2026) Air hujan Jakarta mengandung mikroplastik*
- *JAAN (2026) Paus Mati Terdampar di Pantai Malaya*
- *Prihatini & Jatmiko (2026) Mendagri: RI Urutan Kelima Negara Penghasil Sampah Terbanyak di Dunia*
- *Priyadi (2024) Peran Kelas Menengah sebagai Penggerak Ekonomi Sulastri (2022) Peran Penting UMKM dalam Ancaman Isu Resesi*
- *Susanto (2020) Janjikan Bebas Sampah Plastik 2040, Indonesia Didesak Serius. Kompas.Id.*

Kaltara Perkuat Kolaborasi Kawasan Timur Indonesia Melalui Konreg PDRB KASULAMPUA 2026

Forum strategis 19 provinsi di Tanjung Selor lahirkan Kesepakatan Benuanta — komitmen bersama menuju pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di kawasan timur Indonesia.layanan kesehatan antarwilayah.

TEMA KONREG 2026 : "KEDAULATAN PANGAN UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF DI WILAYAH KASULAMPUA"

Provinsi Kalimantan Utara kembali menunjukkan perannya sebagai salah satu motor penggerak pembangunan kawasan timur Indonesia melalui penyelenggaraan Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto (Konreg PDRB) Wilayah KASULAMPUA Tahun 2026.

Kegiatan yang dilaksanakan di Tanjung Selor ini mempertemukan Bapperida, BPS, Bank Indonesia, serta DJPb dari 19 provinsi untuk membahas isu strategis pembangunan dan merumuskan langkah bersama mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Ketahanan pangan dipilih sebagai tema utama mengingat perannya dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya tahan daerah terhadap tantangan global seperti perubahan iklim dan ketidakpastian ekonomi dunia.

Sebelum pelaksanaan Konreg, telah dilakukan evaluasi tindak lanjut hasil Kesepakatan Wasaka Tahun 2025. Hasilnya menunjukkan sebagian besar kesepakatan telah ditindaklanjuti, terutama dalam penguatan statistik sektoral, forum komunikasi ekonomi dan fiskal, serta implementasi prinsip Satu Data Indonesia.

Sebagai tuan rumah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Bapperida berperan aktif memfasilitasi proses diskusi dan koordinasi lintas wilayah, memperkuat posisi Kaltara sebagai simpul strategis pembangunan kawasan timur Indonesia.

Forum ini juga menghadirkan dampak ekonomi langsung bagi daerah. Tingkat hunian hotel meningkat, usaha kuliner lokal ramai pengunjung, dan pelaku UMKM mendapat peluang memperkenalkan produk unggulan kepada delegasi dari seluruh Indonesia Timur.

> *"Melalui semangat kolaborasi yang tertuang dalam Kesepakatan Benuanta, seluruh anggota KASULAMPUA berkomitmen mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi daerah.*
>
> ***— Kesepakatan Benuanta 2026, Tanjung Selor***



KESEPAKATAN BENUANTA

Konreg PDRB KASULAMPUA 2026 menghasilkan Kesepakatan Benuanta, komitmen bersama seluruh provinsi di wilayah KASULAMPUA yang mencakup empat pilar utama pembangunan kawasan:

- **Peningkatan kolaborasi penyediaan statistik dasar, sektoral, dan tematik yang andal dan terintegrasi guna mendukung kebijakan berbasis data.**
- **Optimalisasi forum komunikasi perekonomian dan fiskal sebagai sarana sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah.**
- **Penguatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan melalui sinergi pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat.**
- **Mendorong hilirisasi sumber daya alam yang menciptakan nilai tambah serta memperkuat daya saing tenaga kerja daerah**

Rekomendasi Strategis

01
Koordinasi Data Makroekonomi

Penguatan sistem penyediaan dan integrasi data makroekonomi antarprovinsi berbasis prinsip Satu Data Indonesia.

02
Kualitas Belanja & Pembiayaan Inovatif

Peningkatan efektivitas belanja pemerintah dan eksplorasi instrumen pembiayaan inovatif untuk percepatan pembangunan daerah.

03
Ketahanan Pangan & Pertanian

Penguatan sektor pertanian sebagai fondasi ketahanan pangan daerah dalam menghadapi perubahan iklim dan dinamika global.

04
Hilirisasi Industri & UMKM

Percepatan hilirisasi berbasis SDA dan penguatan UMKM sebagai pilar utama ekonomi daerah di kawasan KASULAMPUA.

Sektor Unggulan Kaltara

01
Pertanian & Pangan

Komoditas tanaman pangan dan perkebunan menjadi tulang punggung ketahanan pangan regional.

02
Perikanan & Kelautan

Potensi laut dan perairan darat yang besar untuk mendukung ekspor produk perikanan bernilai tinggi.

03
Energi Baru Terbarukan

Pengembangan energi hijau sejalan dengan target *net zero* dan kebutuhan industri hilir di kawasan.

04
Industri Pengolahan

Hilirisasi SDA membuka lapangan kerja & meningkatkan nilai tambah produk secara signifikan.

05
Kawasan Industri Tanah Kuning

Kawasan strategis yang siap menarik investasi besar dan menjadi motor penggerak ekonomi Kaltara.

06
UMKM & Perdagangan

Pilar utama ekonomi rakyat yang terus diperkuat melalui akses pasar, pembiayaan & digitalisasi usaha.

Tonggak Perjalanan KASULAMPUA

2024
Pembentukan forum koordinasi PDRB wilayah KASULAMPUA

2025
Kesepakatan Wasaka fondasi kolaborasi data dan fiskal

2026
Kesepakatan Benuanta Tanjung Selor, Kalimantan Utara

2027
Implementasi penuh transformasi ekonomi inklusif kawasan

Kalimantan Utara – Gerbang Pertumbuhan Baru Kawasan Timur Indonesia

Kepercayaan sebagai tuan rumah Konreg PDRB KASULAMPUA 2026 menegaskan kapasitas Kalimantan Utara dalam menyelenggarakan forum regional berskala besar, sekaligus menjadi bukti komitmen pemerintah daerah mendukung pembangunan berbasis kolaborasi. Keberhasilan ini membuka peluang jejaring kerja sama baru yang dapat mendukung peningkatan investasi dan perdagangan antardaerah di masa mendatang serta memperkuat citra Kaltara sebagai simpul strategis Indonesia Timur.

SOSIALISASI & KEBIJAKAN DAERAH

RAD Pangan dan Gizi: Fondasi Menuju Kaltara Sehat dan Sejahtera

Diselenggarakan pada 26 Mei 2026. Kegiatan yang dipimpin Sekprov. ini untuk menyamakan arah kebijakan pangan, percepatan penurunan stunting, dan kemandirian pangan berbasis komoditas lokal.



LATAR BELAKANG

Ketahanan pangan dan perbaikan gizi merupakan fondasi penting dalam mewujudkan SDM yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Di tengah tantangan perubahan iklim, dinamika geopolitik, dan gangguan rantai pasok pangan, diperlukan kebijakan yang memperkuat sistem pangan daerah secara terintegrasi.

Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut ditetapkannya Pergub Kaltara Nomor 32 Tahun 2025 tentang RAD Pangan dan Gizi 2025–2029, pedoman bersama lintas sektor yang menyelaraskan kebijakan daerah dengan agenda nasional dan target SDGs.

> *Diperlukan intervensi terintegrasi dari hulu hingga hilir untuk memastikan pangan yang cukup, aman, beragam, bergizi, seimbang, dan berkelanjutan.*
>
> **— Kementerian PPN/Bappenas**

4 ISU STRATEGIS RAD

- **Ketersediaan Pangan**. Produksi dan keterjaminan pasokan pangan dari hulu ke hilir di seluruh wilayah Kaltara.
- **Keterjangkauan Pangan.** Aksesibilitas harga dan distribusi pangan, khususnya di daerah perbatasan dan kepulauan.
- **Pemanfaatan Pangan & Gizi.** Percepatan penurunan stunting, konsumsi pangan bergizi, dan edukasi keluarga.
- **Penguatan Kelembagaan.** Sinergi perangkat daerah, mitra strategis, dan kolaborasi kabupaten/kota.

KOMODITAS LOKAL UNGGULAN

Optimalisasi potensi lokal untuk kemandirian pangan dan kesejahteraan petani yaitu :

JAGUNG | UBI KAYU | PERIKANAN | HORTIKULTURA

ARAH TINDAK LANJUT

Kabupaten/kota didorong segera menyusun atau menyesuaikan RAD Pangan dan Gizi masing-masing agar selaras dengan kebijakan provinsi. Forum diskusi menghasilkan masukan penting yaitu sinkronisasi dokumen perencanaan, keterlibatan mitra penanganan kemiskinan dan stunting, serta kolaborasi lintas perangkat daerah yang lebih kuat.

Percepatan penurunan stunting dilaksanakan melalui intervensi spesifik dan sensitif, edukasi gizi keluarga, peningkatan konsumsi protein, serta kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan.

Dengan penguatan data, komitmen pemangku kepentingan, dan implementasi program terukur, RAD Pangan dan Gizi 2025–2029 diharapkan menjadi fondasi masyarakat Kalimantan Utara yang sehat, tangguh, dan sejahtera.



UHC	9	JKN	REHAB
Target Cakupan Semesta	Instansi Lintas Sektor	Program Strategis Nasional	Program Bayar Bertahap

Kolaborasi Lintas Sektor Diperkuat, Kaltara Mantapkan Langkah Menuju *Universal Health Coverage* Berkualitas

Tanjung Selor - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat, ditegaskan melalui Forum Komunikasi Implementasi Strategi Penguatan Rekrutmen Cakupan dan Tingkat Keaktifan Peserta UHC Tahun 2026 di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Selasa (9/6).

Forum ini memperkuat sinergi pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan, menjaga keberlangsungan Program JKN sekaligus meningkatkan kualitas perlindungan kesehatan masyarakat Kalimantan Utara.

Forum komunikasi tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara selaku Ketua Forum dengan melibatkan jajaran perangkat daerah strategis, di antaranya Dinas Kesehatan, Bappeda dan Litbang, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, DPMPTSP, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta jajaran BPJS Kesehatan Wilayah VIII dan Cabang Tarakan.

BPJS Kesehatan menjelaskan masyarakat kini dapat menjadi peserta JKN tanpa pemeriksaan kesehatan awal dan tanpa batasan usia. Proses aktivasi kepesertaan juga semakin cepat sehingga masyarakat segera memperoleh perlindungan saat membutuhkan pelayanan medis.

Peserta kini memiliki lebih banyak pilihan kanal pembayaran iuran melalui perbankan, dompet digital, hingga gerai ritel modern. Bagi peserta mandiri yang menunggak, tersedia Program REHAB (Rencana Pembayaran Bertahap) untuk mengaktifkan kembali kepesertaan secara

Tantangan Utama di Lapangan

01
Peserta Belum Terdaftar

Masih ada masyarakat yang belum mendaftar sebagai peserta aktif JKN, perlu pendekatan rekrutmen yang lebih proaktif.

02
Status Dinonaktifkan

Tunggakan iuran, perubahan status pekerjaan, dan perpindahan domisili menjadi penyebab utama peserta tidak aktif.

03
Kepatuhan Badan Usaha

Penguatan pengawasan agar seluruh badan usaha mendaftarkan pekerjanya sesuai regulasi JKN yang berlaku

04
Integrasi Data Kependudukan

Sinkronisasi data peserta JKN dengan data kependudukan daerah perlu diperkuat untuk memastikan akurasi cakupan.

bertahap. Aplikasi Mobile JKN memungkinkan peserta mengakses layanan lebih mudah, mulai dari pendaftaran pelayanan kesehatan, pengambilan nomor antrean, hingga informasi kepesertaan secara daring.

Mendorong layanan yang lebih cepat, transparan, dan setara. Pemerintah daerah berkewajiban mengintegrasikan program jaminan kesehatan daerah ke dalam JKN, serta berwenang mendaftarkan masyarakat yang belum memiliki jaminan aktif melalui skema pembiayaan APBD, mempercepat pencapaian UHC bagi seluruh penduduk.

Keakuratan data kependudukan menjadi fondasi utama memastikan tidak ada masyarakat yang terlewat dari perlindungan JKN, sehingga sinergi Disdukcapil, Dinas Sosial, pemerintah kabupaten/kota, dan BPJS Kesehatan terus diperkuat.

Forum juga menyoroti kepatuhan badan usaha mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta JKN, dengan dukungan regulasi daerah dan pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk memperluas kepesertaan.

Pada akhir forum, seluruh peserta menyepakati pentingnya memperkuat koordinasi lintas sektor sebagai langkah nyata menjaga keberlangsungan *Universal Health Coverage* di Kalimantan Utara, melalui sinkronisasi data, penguatan regulasi, dan perluasan sosialisasi kepada masyarakat. (ROM)

> “Program JKN merupakan program strategis nasional yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat
>
> — H. Denny Harianto, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara





Kaltara Rancang Peta Jalan 2027: Merata, Berkarakter, Bernilai

Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Tahun 2027 merumuskan arah pembangunan daerah sebagai fondasi transformasi Kalimantan Utara menuju Indonesia Emas 2045, menyelaraskan prioritas provinsi dengan agenda nasional.

Tanjung Selor - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Gedung Gabungan Dinas I, Tanjung Selor.

Kegiatan ini dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara, unsur Forkopimda, DPRD Provinsi, Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Utara, instansi vertikal, perangkat daerah, akademisi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, serta pemangku kepentingan pembangunan lainnya. Musrenbang diselenggarakan sebagai forum strategis untuk memperoleh gambaran arah pembangunan daerah sekaligus merumuskan prioritas melalui diskusi dan penyelarasan aspirasi antar pemangku kepentingan.

Rangkaian acara diawali laporan penyelenggaraan oleh Bapperida, dilanjutkan sambutan dan pembukaan resmi Gubernur, penyampaian materi narasumber, sesi diskusi dan tanya jawab, hingga penandatanganan Berita Acara Musrenbang RKPD Tahun 2027.

Gubernur Kalimantan Utara menegaskan tahun 2027 sebagai fase penting memperkuat fondasi transformasi menuju Indonesia Emas 2045, sejalan dengan tema RKP Nasional 2027.

Pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi, karakteristik, dan kearifan lokal sebagai modal utama pembangunan yang inovatif dan berkelanjutan..

— KEMENTERIAN DALAM NEGERI

TEMA PEMBANGUNAN DAERAH 2027

"Pembangunan Wilayah yang Merata, Sumber Daya Manusia Berkarakter, dan Ekonomi Bernilai Tambah Menuju Kalimantan Utara sebagai Beranda Depan NKRI yang Makmur."

Tema tersebut difokuskan pada tiga arah utama yaitu pemerataan pembangunan wilayah melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan ekonomi, khususnya di kawasan perbatasan, pedalaman, dan pesisir; dan penguatan ekonomi daerah melalui pengembangan ekonomi hijau dan biru serta peningkatan investasi berkelanjutan;

Kemudian peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta penguatan karakter berbasis nilai sosial, budaya, dan keagamaan.

Perwakilan Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan arah kebijakan nasional 2027 yang menitikberatkan penguatan produktivitas, investasi, dan industri, termasuk hilirisasi, diversifikasi ekonomi bernilai tambah, konektivitas wilayah, dan penguatan fondasi keuangan daerah.

Kepala Bapperida Bertius menyampaikan bahwa RKPD 2027 diarahkan mewujudkan pembangunan merata, meningkatkan kualitas SDM berkarakter, serta mengembangkan ekonomi bernilai tambah dan berkelanjutan, dengan sejumlah isu strategis sebagai perhatian utama.

POIN PEMBAHASAN

1. **Konektivitas & Infrastruktur**
   Peningkatan kualitas jalan dan konektivitas wilayah perbatasan.
2. **Ekonomi Hijau & Biru**
   Penguatan ekonomi produktif dan pengendalian inflasi
3. **Pendidikan & Kesehatan**
   Peningkatan kualitas layanan dasar bagi masyarakat.
4. **Kawasan Strategis Nasional**
   Pengelolaan kawasan dan skema pembiayaan kreatif pembangunan.
5. **Data Terpilah & Inklusi**
   Keberpihakan pembangunan bagi kelompok rentan, perempuan, dan disabilitas.

Musrenbang turut diwarnai masukan konstruktif dari akademisi, dunia usaha, pemerintah kabupaten/kota, mitra pembangunan, dan organisasi masyarakat mengenai berbagai isu pembangunan daerah.

Melalui forum ini, diharapkan tercapai kesepakatan prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan prioritas nasional, sinkronisasi program provinsi dan kabupaten/kota, serta komitmen bersama pembangunan yang terarah dan kolaboratif.

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Musrenbang RKPD 2027, sebagai komitmen bersama mewujudkan Kalimantan Utara yang maju, makmur, dan berkelanjutan, beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (ENR)

Pemprov. Kaltara Terima Audiensi PT INTRA

Bahas Rencana Pengembangan Perkeretaapian di Kaltara



Tanjung Selor - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menerima audiensi dari PT Indonesia Transit Synergy (INTRA) guna membahas rencana pembangunan jaringan perkeretaapian di Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Badan Penghubung Pemprov. Kaltara, Jl. Kramat II Kwitang, Jakarta Pusat pada Selasa, (21/4).

Audiensi tersebut menjadi forum awal untuk mendiskusikan peluang pengembangan transportasi berbasis rel sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas wilayah, mendukung pengembangan kawasan industri, serta meningkatkan efisiensi logistik di Kalimantan Utara.

FAKTA PROYEK

Panjang Trase
± 506 km

Koridor
Sei Menggaris → Tanjung Redeb
Layanan
Angkutan Barang & Penumpang
Program
Trans Kalimantan – Rencana Induk Perkeretaapian Nasional

POTENSI DAN PELUANG INVESTASI

Perwakilan PT INTRA menjelaskan bahwa Kalimantan Utara memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama pada sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan industri. Namun demikian, tingginya biaya logistik dan keterbatasan aksesibilitas masih menjadi tantangan utama dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui pembangunan perkeretaapian, diharapkan distribusi barang dalam jumlah besar dapat dilakukan secara lebih efisien, aman, dan berkelanjutan.

Selain melayani angkutan barang, jalur yang direncanakan juga dapat dimanfaatkan untuk pelayanan angkutan penumpang antarwilayah. Dalam diskusi yang berlangsung, Bapperida Prov. Kalimantan Utara menyampaikan bahwa pengembangan infrastruktur strategis perlu mempertimbangkan kesesuaian dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, kebutuhan masyarakat, aspek tata ruang, kelayakan ekonomi, serta keberlanjutan lingkungan.

Rencana pembangunan jaringan kereta api dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan kawasan industri strategis, termasuk Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning-Mangkupadi, sekaligus memperkuat konektivitas antara pusat-pusat produksi, kawasan industri, pelabuhan, dan pusat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara.

> *"Melalui sinergi antara pemerintah dan dunia usaha, diharapkan pembangunan infrastruktur strategis dapat menjadi katalisator percepatan pembangunan wilayah, peningkatan daya saing daerah, serta pemerataan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara."*

TUJUAN UTAMA

- Menurunkan biaya logistik
- Mendukung hilirisasi industri
- Meningkatkan konektivitas wilayah
- Mendukung KIHI Tanah Kuning
- Memperkuat Trans Kalimantan

TAHAPAN LANJUTAN

1. Studi Kelayakan
2. Penetapan Trase
3. Skema Pembiayaan
4. Koordinasi Pusat & Daerah



Suasana audiensi antara Pemprov. Kalimantan Utara dan PT Indonesia Transit Synergy (INTRA) membahas rencana perkeretaapian Trans Kalimantan

Audiensi ini juga menjadi langkah awal untuk menjajaki peluang kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak swasta dalam pengembangan infrastruktur perkeretaapian. Kedepan, diperlukan berbagai tahapan lanjutan, mulai dari studi kelayakan, penetapan trase, penyusunan skema pembiayaan, hingga koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan terkait. (RSL)



14,2 %
TARGET NASIONAL 2029

11,4 %
TARGET KALTARA 2029

RKPD 2027
DOKUMEN ACUAN PERENCANAAN

Kolaborasi dan Data Terintegrasi Jadi Kunci Percepatan Penurunan Stunting di Kalimantan Utara

Tanjung Selor - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menegaskan komitmennya mempercepat penurunan angka stunting melalui penguatan kolaborasi lintas sektor dan perencanaan berbasis data. Komitmen ini mengemuka dalam kegiatan Pra Musrenbang Tematik Stunting Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 di Aula GADIS, Tanjung Selor, Rabu (8/4), menjadi ruang strategis menyelaraskan kebijakan dan merumuskan langkah prioritas RKPD 2027.

Forum yang diinisiasi Bapperida Provinsi Kalimantan Utara ini menjadi ruang strategis menyelaraskan kebijakan, mengevaluasi capaian program, sekaligus merumuskan langkah prioritas penyusunan RKPD Tahun 2027.

Tema “Intervensi Pencegahan dan Penurunan Stunting Melalui Kolaborasi dan Data yang Terintegrasi” mencerminkan arah baru penanganan stunting yang lebih komprehensif. Membuka kegiatan, Wakil Gubernur Kalimantan Utara sekaligus Ketua TPPS Provinsi, Ingkong Ala, menegaskan bahwa stunting bukan hanya persoalan kesehatan, melainkan tantangan pembangunan sumber daya manusia yang harus ditangani bersama-sama.

Untuk mencapai target tersebut, diperlukan perubahan pendekatan dari yang bersifat kuratif menjadi upaya pencegahan yang menyentuh seluruh siklus kehidupan. Wakil Gubernur juga menyoroti pentingnya pemenuhan standar pelayanan dasar kesehatan, terutama peningkatan kunjungan posyandu yang masih rendah sebagai garda terdepan pemantauan tumbuh kembang anak.

Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Utara, Bertius, menyoroti pentingnya penguatan fungsi

ISU STRATEGIS YANG MENGEMUKA

Ketahanan pangan dan perbaikan gizi merupakan Dalam forum yang melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, akademisi, ormas, dunia usaha, hingga mitra pembangunan, sejumlah isu strategis mengemuka dan perlu menjadi prioritas tindak lanjut bersama.

Penguatan Posyandu
Kondisi fisik, kapasitas kader, dan kualitas intervensi layanan gizi perlu ditelusuri dan diperbaiki secara menyeluruh.

Program MBG & Genting
Optimalisasi Makan Bergizi Gratis bagi ibu hamil, menyusui, dan baduta serta perluasan Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting) ke seluruh kabupaten/kota.

Sanitasi & Air Minum
Faktor determinan yang tidak bisa dipisahkan dari upaya penurunan angka stunting di daerah.

Kualitas Data Stunting
Pemutakhiran data masih terkendala akses telekomunikasi terbatas di sebagian wilayah Kaltara.

Konvergensi Lintas Sektor
Koordinasi antar-OPD dan sinkronisasi program perlu diperkuat dari provinsi hingga desa.

posyandu sebagai pusat layanan dasar masyarakat, mulai dari kondisi fisik posyandu, kapasitas kader, hingga kualitas intervensi yang diberikan kepada sasaran.

Menutup kegiatan, Kepala Bapperida menegaskan seluruh rekomendasi yang dihasilkan akan menjadi bagian penting penyusunan RKPD Tahun 2027, sebagai bukti percepatan penurunan stunting bukan hanya urusan sektor kesehatan semata, menuju generasi emas Kalimantan Utara di masa depan. (ROM)

SUARA PEMANGKU KEPENTINGAN

1. Baznas Prov. Kaltara — Program makanan tambahan di Bulungan terbukti menurunkan stunting di wilayah sasaran. Praktik baik ini perlu direplikasi.
2. Kemendukbangga / BKKBN — Dorong optimalisasi MBG bagi ibu hamil, menyusui, dan baduta serta perluas program Genting ke seluruh kab/kota.
3. Dinas Kesehatan Prov. — Intervensi perilaku pola hidup sehat, edukasi gizi keluarga, dan kepatuhan memanfaatkan layanan kesehatan.
4. Dinas Sosial Prov. — Tantangan pemutakhiran data stunting di wilayah dengan keterbatasan akses telekomunikasi.
5. Dinas PUPR-PERKIM — Air minum layak dan sanitasi aman adalah determinan stunting yang tak terpisahkan.
6. Bapperida — Penelusuran mendalam kondisi posyandu, kapasitas kader, dan kualitas intervensi kepada sasaran prioritas.

> *"Stunting bukan hanya persoalan kesehatan, melainkan tantangan pembangunan sumber daya manusia yang harus ditangani secara bersama-sama."*
>
> *— Ingkong Ala, Wakil Gubernur Kalimantan Utara Utara*

DIALOG KEBIJAKAN · POLICY BRIEF · KELOMPOK RENTAN

SEKDA : KALTARA KOMITMEN PRIORITASKAN HAK DISABILITAS DAN MASYARAKAT ADAT

Dilaksanakan di Ruang Rapat Gubernur, Lantai 4 Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, didukung Program SKALA, kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia.

30-40	2 ISU	18.000 ha
PESERTA LINTAS SEKTOR HADIR	POLICY BRIEF STRATEGIS DIBAHAS	WILAYAH ADAT PUNAN BATU DIUSULKAN

Tanjung Selor - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., secara resmi membuka Dialog Kebijakan Penyampaian Policy Brief: Isu Strategis Kelompok Rentan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026, di Ruang Rapat Gubernur, Tanjung Selor, Senin (8/6).

Sekda menegaskan bahwa pembangunan daerah harus memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali, dengan menempatkan inklusivitas, kesetaraan, dan keadilan sosial sebagai bagian penting dari setiap proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

KELOMPOK RENTAN YANG DIWAKILI JARINGAN MASYARAKAT SIPIL (JM)S KALTARA

PEREMPUAN | ANAK | MASYARAKAT ADAT

LANSIA | PENYANDANG DISABILITAS | KELOMPOK RENTAN LAINNYA

> *"Suara dan aspirasi kelompok rentan perlu menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan, bukan hanya sebagai isu sosial, melainkan sebagai bagian integral dari agenda pembangunan lintas sektor."*
>
> *— H. Denny Harianto,*
> *Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara*



Suara Rentan Jadi Bagian Pengambilan Kebijakan Daerah

Forum ini membahas dua isu strategis yang nyata dan mendesak. Pertama, penyandang disabilitas di Kalimantan Utara harus memperoleh akses kerja yang layak, pelatihan adaptif, serta lingkungan kerja inklusif.

Kedua, masyarakat adat termasuk Masyarakat Hukum Adat Punan Batu di Kabupaten Bulungan yang mengusulkan pengakuan wilayah seluas 18.000 hektare perlu mendapatkan kepastian hukum atas wilayah hidup mereka di tengah tekanan ekspansi investasi berbasis lahan yang terus meningkat.

Sekda menegaskan kedua isu tersebut sejalan dengan mandat RPJMD Kalimantan Utara 2025–2029 yang menempatkan transformasi sosial inklusif, pembangunan hijau, dan tata kelola kolaboratif sebagai arah utama pembangunan daerah. Dengan demikian, perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan masyarakat adat bukan sekadar kewajiban moral, melainkan bagian dari agenda pembangunan yang harus diwujudkan bersama.

Kegiatan dihadiri sekitar 30–40 peserta, meliputi 14 OPD Provinsi, Staf Ahli Sekda, akademisi dari Universitas Borneo Tarakan, Universitas Kaltara, dan STIE Bultar, serta JMS Mentari Kaltara yang mewakili enam kelompok rentan. (AS)

POLICY BRIEF 1 – DISABILITAS

- Akses kerja layak bagi penyandang disabilitas
- Pelatihan vokasional yang adaptif dan inklusif
- Lingkungan kerja ramah disabilitas di sektor publik dan swasta
- Penyampaian oleh JMS Mentari Kaltara

HARAPAN DAN TINDAK LANJUT

- Seluruh OPD wajib menyampaikan respons tertulis terhadap rekomendasi Policy Brief
- Bapperida menyusun matriks tindak lanjut paling lambat 30 hari pasca kegiatan
- Rekomendasi relevan diintegrasikan ke dalam RKPD, Renstra OPD, dan APBD Kaltara

POLICY BRIEF 2 – MASYARAKAT ADAT

- Kepastian hukum wilayah adat Punan Batu, Bulungan
- Perlindungan dari ekspansi investasi berbasis lahan
- Pengakuan formal Masyarakat Hukum Adat dalam regulasi daerah
- Penyampaian oleh JMS Mentari Kaltara



KICK OFF MEETING PPSP 2026

Tanjung Selor - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Bapperida menggelar *Kick Off Meeting* (KOM) Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2026 pada 28 April 2026 secara *hybrid.* Kegiatan ini menjadi langkah awal pelaksanaan PPSP yang bertujuan menyamakan persepsi, menyusun rencana kerja, serta memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam percepatan pembangunan sanitasi berkelanjutan.

Pertemuan dihadiri oleh Pokja PKP Provinsi Kalimantan Utara, Pokja PKP kabupaten/kota se-Kaltara, Pokja PPAS Nasional, Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kalimantan Utara, serta narasumber dari kementerian dan lembaga terkait.

Kepala Bapperida Bertius menegaskan bahwa sanitasi merupakan fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif. Program PPSP diharapkan mengintegrasikan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pada kesempatan tersebut, Direktorat PKP Bappenas memaparkan arah kebijakan sanitasi nasional dalam RPJMN 2025-2029 dengan target akses sanitasi aman 30% pada 2029 melalui pendekatan *Citywide Inclusive Sanitation (CWIS).* Sesi diskusi menunjukkan tingginya komitmen pemerintah kab/kota, khususnya Kab. Malinau dan Nunukan yang menyampaikan kebutuhan pemutakhiran EHRA, SSK, dan pembangunan IPLT. (RSL)

PESERTA KEGIATAN

- Pokja PKP Provinsi Kalimantan Utara
- Pokja PKP Kab/Kota se-Kaltara
- Pokja PPAS Nasional
- Balai Penataan Bangunan & Kawasan
- Narasumber Kementerian & Lembaga

TARGET RPJMN 2025-2029

Akses sanitasi aman 30% pada 2029
85% RT terlayani pengumpulan sampah
Pendekatan CWIS *(Citywide Inclusive Sanitation)*
Menuju Indonesia Emas 2045

TANTANGAN &TINDAK LANJUT

Integrasi SSK ke perencanaan daerah
Penguatan kapasitas Pokja PPSP
Sinergi hingga tingkat desa
Pemutakhiran EHRA & SSK
Pembangunan IPLT Malinau & Nunukan

KONTRIBUSI KEMENTERIAN

Bappenas: Arah kebijakan sanitasi nasional
Kemen PU: Optimalisasi infrastruktur
Kemenkes: Studi EHRA & target STBM
Kemendagri: Tata kelola sanitasi lintas sektor

Advokasi Kebijakan Tata Kelola JFAK

Sekda Denny Harianto Buka Forum Advokasi Policy Brief dan Tata Kelola Analis Kebijakan

10 Policy Brief Final

2 Hari Forum

8 Isu Strategis



Tanjung Selor - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., secara resmi membuka Forum Advokasi Policy Brief PERA dan Tata Kelola JFAK Provinsi Kalimantan Utara, Senin (18/5) di Aula Kantor Gubernur. Sekda menyampaikan apresiasi kepada Bapperida, BPSDM Kaltara, SKALA, dan seluruh pihak yang memfasilitasi forum strategis ini.

Forum ini merupakan tindak lanjut workshop penguatan strategi advokasi kebijakan hasil studi *Public Expenditure Review and Analysis (PERA)* yang digelar pada Februari 2026 di Tarakan. Sekda menekankan pentingnya integrasi rekomendasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah guna menjawab fenomena *low growth – high spending* serta kesenjangan akses layanan antarwilayah di Kalimantan Utara.

Forum dua hari ini juga membahas tata kelola Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) di Kaltara. Dengan sinergi ini, Pemprov Kaltara berkomitmen memperkuat ekosistem kebijakan berbasis bukti demi peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (AS)

Pihak yang Terlibat

- Bapperida Provinsi Kalimantan Utara
- BPSDM Kaltara
- SKALA — mitra fasilitator
- OPD penyusun 10 policy brief final

Agenda Tata Kelola JFAK

- Komitmen tertulis pembagian tanggung jawab antar instansi
- Pengaktifan Forum JFAK Provinsi Kaltara
- Wadah kolaborasi berkelanjutan komunitas analis kebijakan

"Rekomendasi policy brief harus terintegrasi ke dalam RKPD, KUA-PPAS, dan RKA-SKPD untuk menjawab tantangan struktural Kaltara."

8 Isu Strategis Policy Brief

FISKAL · AIR MINUM · KESEHATAN · KELAUTAN · PENDIDIKAN · INVESTASI · INFRASTRUKTUR · INKLUSIF



Sinergi Lintas Sektor Perkuat Langkah Kaltara Menuju Eliminasi AIDS, TBC, dan Malaria 2030

Kolaborasi ADINKES Kaltara dan Bapperida mengintegrasikan program pencegahan dan pengendalian ATM ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah menuju target nasional 2030.

2.360	213	60
ESTIMASI KASUS TBC KALTARA 2026	KASUS HIV/AIDS KUMULATIF	KASUS MALARIA POSITIF 2026

Tanjung Selor -Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mempercepat eliminasi AIDS, Tuberkulosis (TBC), dan Malaria (ATM) kembali ditegaskan melalui pelaksanaan Workshop Petunjuk Teknis Integrasi (PTI) dan Kebijakan Nasional Terkait ATM yang berlangsung pada 11–13 Mei 2026 di Hotel Grand Pangeran Khar, Tanjung Selor.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara H. Denny Harianto menyampaikan bahwa AIDS, TBC, dan Malaria masih menjadi tantangan kesehatan yang berdampak luas terhadap aspek sosial, ekonomi, lingkungan, hingga produktivitas masyarakat. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara terintegrasi melalui penguatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Data yang dipaparkan dalam workshop menunjukkan bahwa hingga tahun 2026 Selain membahas kebijakan, workshop juga melakukan review terhadap RPJMD 2025–2029, RKPD, Renstra, Renja, serta DPA perangkat daerah. Evaluasi

RENCANA TINDAK LANJUT

Integrasikan ke RKPD 2027
Program pencegahan dan pengendalian ATM masuk sebagai prioritas dalam RKPD, Renja, dan penganggaran 2027.

Percepatan Penyusunan RAD
Rencana Aksi Daerah ATM segera disusun sebagai panduan operasional lintas sektor.

Perkuat Koordinasi
Sinkronisasi program ATM dari tingkat provinsi hingga desa dan kelurahan secara berkala.

Optimalkan Dana Desa
Dorong pemanfaatan dana desa untuk kegiatan pencegahan ATM di tingkat akar rumput.

Kepatuhan Badan Usaha
Perkuat pencegahan HIV/TBC di lingkungan kerja melalui Disnakertrans.

Monitor & Evaluasi
Sistem monev terintegrasi memastikan capaian target eliminasi ATM 2030 *on-track.*

KONTRIBUSI LINTAS SEKTOR

1. **Dinas Sosial** — Pemadanan data penerima bantuan sosial dengan data penderita ATM untuk intervensi yang lebih tepat sasaran.
2. **DPMD** — Potensi pemanfaatan dana desa untuk mendukung pencegahan dan pengendalian ATM di tingkat desa.
3. **Disnakertrans** — Penguatan implementasi pencegahan HIV dan TBC di lingkungan kerja bagi kelompok pekerja.
4. **BPKAD & Inspektorat** — Tata kelola anggaran yang akuntabel dan tepat sasaran untuk program ATM yang efisien.
5. **BAZNAS & Pemerintah Desa** — Dukungan pembiayaan multipihak memperkuat jangkauan program bagi kelompok rentan.
6. **Bapperida Prov. Kaltara** — *Review* RPJMD 2025–2029, RKPD, Renstra, Renja, dan DPA untuk memastikan ATM terakomodasi dalam perencanaan pembangunan.

tersebut bertujuan mengidentifikasi sejauh mana program ATM telah terakomodasi dalam perencanaan pembangunan dan menentukan langkah perbaikan untuk tahun 2027. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas intervensi sekaligus menjamin keberlanjutan pendanaan program.

Diskusi lintas sektor menjadi salah satu bagian paling penting dalam kegiatan ini. DPMD menyoroti potensi pemanfaatan dana desa untuk mendukung kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit. Disnakertrans turut mendorong penguatan implementasi pencegahan HIV dan TBC di lingkungan kerja, sedangkan BPKAD dan Inspektorat menekankan pentingnya tata kelola anggaran yang akuntabel dan tepat sasaran.

Keterlibatan BAZNAS dan pemerintah desa juga mendapat perhatian khusus. Dukungan pembiayaan dari berbagai sumber dinilai mampu memperkuat jangkauan program, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat yang terdampak langsung oleh penyakit ATM.

Dengan semangat sinergi dan komitmen bersama yang terbangun selama *workshop*, Kalimantan Utara optimistis dapat mempercepat langkah menuju eliminasi ATM tahun 2030 sekaligus mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera. (ROM)



Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Bapperida Kaltara Bahas Indikator Air Minum Aman dan Sanitasi Aman

Tanjung Selor - Dalam upaya mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development Goals/SDGs),* Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Utara menggelar rapat pembahasan indikator Air Minum Aman dan Sanitasi Aman pada 21 Mei 2026 di Ruang Rapat Bapperida Provinsi Kalimantan Utara.

Rapat yang dipimpin oleh Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah (PPW) Bapperida Provinsi Kalimantan Utara, Ruslim, S.T., M.T., membahas transformasi indikator pelayanan dasar dari kategori “layak” menuju kategori “aman”. Perubahan paradigma ini menjadi penting karena capaian akses yang layak belum tentu menjamin kualitas dan keamanan layanan yang diterima masyarakat. Pada sektor air minum, indikator aman tidak hanya menilai ketersediaan sarana, tetapi juga mencakup aspek kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan (4K). Sementara pada sektor sanitasi, fokus utama diarahkan pada pengelolaan limbah domestik yang aman sehingga tidak mencemari lingkungan.

> ***“Capaian akses yang layak belum tentu menjamin kualitas dan keamanan layanan yang diterima masyarakat.”***

Dalam pembahasan terungkap sejumlah tantangan yang masih dihadapi untuk mencapai target air minum aman dan sanitasi aman. Pada sektor air minum, keterbatasan jaringan perpipaan, belum optimalnya kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), kualitas sumber air yang belum memenuhi baku mutu, serta keterbatasan pendanaan dan kelembagaan menjadi isu utama.

Selain itu, perilaku masyarakat yang masih menggunakan sumber air tidak terlindungi juga menjadi tantangan tersendiri. Di sisi sanitasi, perhatian diarahkan pada pentingnya memastikan seluruh rantai pengelolaan air limbah domestik berjalan dengan baik, mulai dari penggunaan tangki septik yang memenuhi standar hingga pengelolaan lumpur tinja di fasilitas pengolahan yang sesuai. Pembahasan indikator Air Minum Aman dan Sanitasi Aman ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mendukung pencapaian target RPJMD 2025–2029 dan RPJPD 2025–2045. Dengan tersedianya indikator yang lebih komprehensif dan terukur, diharapkan pembangunan sektor air minum dan sanitasi tidak hanya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, tetapi juga menjamin kualitas hidup yang lebih sehat, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Utara. (RSL)

KEKAYAAN INTELEKTUAL - KERJASAMA DAERAH

Perkuat Riset & Inovasi Daerah, Bapperida Teken PKS Sentra Kekayaan Intelektual



Tarakan - Bapperida se-Kalimantan Utara mengambil langkah strategis dengan turut serta dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pembentukan dan Penguatan Pengelolaan Sentra Kekayaan Intelektual (KI) di Kantor Walikota Tarakan, Selasa (23/6).

Kegiatan ini mempertemukan Bapperida dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, bersinergi dengan Universitas Kaltara, Universitas Borneo Tarakan, Dinas Pariwisata Tarakan, dan Dinas Pariwisata Provinsi Kaltara, difasilitasi Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Timur.

Pihak yang Terlibat

- Bapperida Provinsi & Kab/Kota se-Kaltara
- Kanwil Kemenkum Kalimantan Timur
- Universitas Kaltara & Universitas Borneo Tarakan
- Dinas Pariwisata Tarakan & Provinsi Kaltara

Tahapan Kegiatan

- Seremoni penandatanganan MoU & PKS
- Sosialisasi substansi Kekayaan Intelektual
- Bimtek: pembuatan akun & simulasi pendaftaran KI

Inisiatif ini menjadi tonggak penting agar potensi riset, inovasi, dan kekayaan komunal daerah langsung terpetakan dan terlindungi sejak tahap perencanaan.

Kepala Kanwil Kemenkumham Kaltim, Dr. Muhammad Ikmal Idrus, S.H., M.H., memimpin sesi sosialisasi substansi KI dan menekankan pentingnya peran perguruan tinggi serta pemanfaatan teknologi informasi. Seluruh instansi diimbau proaktif mendaftarkan karya daerah melalui laman resmi DJKI.

Puncak kegiatan adalah sesi bimbingan teknis aplikatif. Tim Kemenkum Kaltim mendampingi operator Bapperida, Dinas Pariwisata, dan civitas akademika langkah demi langkah, mulai pembuatan akun hingga simulasi pendaftaran KI.

Dengan bekal teknis ini, Bapperida dan mitra strategis di Kaltara diharapkan bertransformasi menjadi “agen KI”, mengawal hilirisasi riset, melindungi Indikasi Geografis, serta mengamankan aset tak berwujud daerah dari klaim pihak lain.(AS)

Pembahasan Ranhir RKPD 2027, Kejar Konsistensi RPJMD

Pemprov Kalimantan Utara membahas Rancangan Akhir RKPD 2027 bersama seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan program selaras RPJMD 2025–2029 dan didukung pendanaan yang realistis.



Tanjung Selor - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Bapperida melaksanakan kegiatan Pembahasan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Ruang Serbaguna Gedung Gabungan Dinas I, Tanjung Selor. Kegiatan ini dihadiri para Staf Ahli Gubernur, para Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Biro, Kepala UPTD, serta jajaran terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Kegiatan diselenggarakan dalam rangka finalisasi dokumen RKPD 2027 sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 101, yang mengatur bahwa Rancangan Akhir RKPD perlu dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah sebelum ditetapkan.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan target-target RPJMD, sehingga pembahasan ini menjadi momentum strategis memastikan program selaras dan realistis. Gubernur menekankan agar program dan kegiatan dalam RKPD maupun Renja Perangkat Daerah 2027 benar-benar mendukung pencapaian target RPJMD Kalimantan Utara 2025–2029.



Tema Pembangunan 2027 : Merata, Berkarakter, Bernilai Tambah

TEMA PEMBANGUNAN DAERAH 2027

"Pembangunan Wilayah yang Merata, Sumber Daya Manusia Berkarakter, dan Ekonomi Bernilai Tambah Menuju Kalimantan Utara sebagai Beranda Depan NKRI yang Makmur."

Tema tersebut sejalan dengan tema RKP Nasional 2027, yaitu "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Peningkatan Produktivitas, Investasi, dan Industri", dan difokuskan pada pemerataan pembangunan wilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan ekonomi daerah bernilai tambah.

Gubernur juga mengingatkan bahwa tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, terutama terkait keterbatasan fiskal daerah, sehingga diperlukan sinergi dan inovasi dari seluruh perangkat daerah.

> *Seluruh perangkat daerah diharapkan dapat bekerja secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil guna mendukung pelaksanaan RKPD Tahun 2027.*
>
> — Gubernur Kalimantan Utara

POIN PEMBAHASAN

1. **KONSISTENSI RPJMD**
   Program dan kegiatan Renja PD mendukung target RPJMD 2025–2029.
2. **PENDANAAN REALISTIS**
   Kegiatan didukung anggaran yang terukur di tengah keterbatasan fiskal.
3. **SINERGI & KOLABORASI**
   Kerja sama seluruh perangkat daerah demi hasil pembangunan efektif.
4. **PROFESIONAL & BERINTEGRITAS**
   Orientasi hasil dalam pelaksanaan RKPD 2027.
5. **DOKUMEN BERKUALITAS**
   Perencanaan terukur dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui rapat pembahasan ini, seluruh perangkat daerah diberikan kesempatan menyampaikan informasi, saran, dan masukan guna menyempurnakan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2027. Hasil pembahasan diharapkan menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah dan nasional.

Pembahasan Ranhir RKPD 2027 menjadi langkah penting menuju penetapan dokumen perencanaan yang selaras, kolaboratif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara. (ENR)

Riset & Inovasi · Ketahanan Pangan

Optimalkan Beras Adan Krayan, Bapperida Bersinergi dengan BRIN dan Unmul



Tanjung Selor - Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) mengunjungi Bapperida Provinsi Kalimantan Utara, Selasa (9/6). Kunjungan ini diterima langsung oleh Kepala Bapperida, Bertius, S.Hut., di Ruang Rapat Gunung Putih. Tim peneliti terdiri atas Handoyo (Pusat Riset Kependudukan BRIN), Hidayanto (Pusat Riset Pertanian BRIN), dan Hafidh (Unmul).

Agenda utama pertemuan adalah membahas penelitian rumah program bertajuk "Ketahanan Pangan Perbatasan: Pengelolaan Beras Adan Berbasis Sistem Sosial dan Ekologi Masyarakat Desa." Fokus pembahasan tertuju pada Beras Adan Krayan, komoditas unggulan hasil pertanian masyarakat Kabupaten Nunukan yang tumbuh subur di dataran tinggi.

Padi golongan Cere ini hadir dalam 15 hingga 22 jenis varietas dengan keistimewaan butir kecil, cita rasa khas, aroma harum, serta tekstur halus dan pulen. Keistimewaan tersebut menjadikan Beras Adan primadona di pasaran dengan harga yang relatif premium, sebuah potensi besar yang belum sepenuhnya dioptimalkan untuk skala nasional.

Melalui pendekatan yang mengintegrasikan sistem sosial dan ekologi masyarakat desa, penelitian ini diharapkan mampu merumuskan strategi pengelolaan yang tepat dan berkelanjutan bagi para petani di wilayah perbatasan. Sinergi antara Bapperida Kaltara, BRIN, dan Unmul tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga memastikan Beras Adan Krayan dapat dioptimalkan sebagai pilar ketahanan pangan nasional yang berdaya saing tinggi.

Peneliti

- Handoyo — Pusat Riset Kependudukan BRIN)
- Hidayanto — Pusat Riset Pertanian BRIN)
- Hafidh — Akademisi Univ. Mulawarman

Keistimewaan Beras Adan

- 15–22 varietas padi golongan Cere
- Butir kecil, halus, dan pulen
- Aroma harum alami khas dataran tinggi
- Harga premium di tingkat petani
- Tumbuh di atas 1.000 mdpl, Krayan, Nunukan

DESK PEMBAHASAN PROGRAM KERJA PRIORITAS NASIONAL (PKPN) TERPILIH UNTUK PERENCANAAN TAHUN 2027

Diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas melalui *Zoom Meeting*, diikuti Bapperida Provinsi Kalimantan Utara bersama perangkat daerah, pemerintah kabupaten, serta kementerian/lembaga terkait.

12	10	2
USULAN PRIORITAS DIAJUKAN	USULAN DIREKOMENDASIKAN	USULAN BELUM DIREKOMENDASIKAN

Tanjung Selor - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Bapperida mengikuti Desk Pembahasan PKPN Terpilih Musrenbang Nasional Tahun 2026 guna melakukan pembahasan teknis dan verifikasi terhadap usulan yang telah disampaikan melalui aplikasi KRISNA Selaras sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027.

Usulan tersebar pada fokus pembangunan kualitas sumber daya manusia, swasembada pangan, energi dan air, infrastruktur dan konektivitas ekonomi, serta stimulus produktivitas dan daya beli masyarakat. Kegiatan berlangsung dengan lancar, ditandai dengan komitmen seluruh pihak untuk terus memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas usulan, serta memastikan program-program prioritas yang diusulkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Utara.

Usulan Direkomendasikan

- Revitalisasi SMA, SLB & SMK
- Bantuan ternak unggas
- Pemberdayaan sosial ekonomi bagi keluarga penerima manfaat (KPM)
- Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) IPA Jelarai
- Pembangunan Sekolah Rakyat
- Pengembangan kampung nelayan
- Sarana budidaya ikan air tawar
- Pembinaan kelompok tani hutan

Usulan Belum Direkomendasikan

- Pembangunan infrastruktur listrik perdesaan, Kabupaten Nunukan
- Peningkatan kapasitas kelompokmasyarakat penerima akses kelola kawasan hutan

LANGKAH TINDAK LANJUT

1. Penyempurnaan dokumen 2 usulan yang belum direkomendasikan
2. Integrasi 10 usulan terekomendasi ke dalam RKPD & RKP 2027
3. Penguatan sinergi pusat dan daerah hingga tahap penganggaran

PERENCANAAN BERBASIS DATA & BUKTI · SATU DATA INDONESIA

PERKUAT PERENCANAAN BERBASIS DATA, PEMPROV KALTARA GELAR PELATIHAN APLIKASI SEPAKAT

Diikuti perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara serta pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Utara untuk memperkuat kapasitas aparatur dalam perencanaan pembangunan berbasis data dan bukti.

DTSEN	Aplikasi KRISNA	Perpres 39/2019
BASIS DATA TUNGGAL SOSIAL EKONOMI	Selaras dan SEPAKAT	DASAR SATU DATA INDONESIA

Tanjung Selor - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Bapperida menyelenggarakan Pelatihan Aplikasi SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu) pada 22–23 April 2026 di Hotel Luminor Tanjung Selor. Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Pengkajian Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bapperida Dedy Irawan, SE.

Pelatihan ini merupakan bagian dari upaya strategis meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, khususnya mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran, terintegrasi, dan berbasis bukti.

FOKUS MATERI PELATIHAN

- Literasi Data
- Platform SEPAKAT
- Pembangunan Inklusif
- Kanvas Analisis
- Intervensi & Penganggaran
- Analisis Data Mikro

> *"Melalui pelatihan ini diharapkan tercipta keseragaman pemahaman dan standar pemanfaatan SEPAKAT berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional di lingkungan pemerintah daerah se-Kalimantan Utara."*



Tema Pembangunan 2027 : Merata, Berkarakter, Bernilai Tambah

Kualitas perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas data dan analisis yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Sejalan dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia serta kebijakan DTSEN, pemerintah daerah dituntut memiliki SDM yang mampu mengolah dan memanfaatkan data secara optimal dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Aplikasi SEPAKAT hadir sebagai instrumen pendukung yang membantu pemerintah daerah mengintegrasikan data sosial dan ekonomi ke dalam proses perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi pembangunan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

Peserta dibekali Pengantar Literasi Data yang menekankan pentingnya memahami kualitas, karakteristik, dan pemanfaatan data sebagai dasar penyusunan kebijakan publik. Analisis data mikro membantu mengidentifikasi karakteristik individu, rumah tangga, maupun kelompok sasaran berdasarkan berbagai indikator sosial dan ekonomi

MATERI HARI KE 1

- Paparan Pengantar Kependudukan
- Bina Suasana
- Pengantar Pembangunan Inklusif
- Pengantar Platform SEPAKAT
- Pengantar Literasi Data

MATERI HARI KE II

- Pengantar Analisis & Analisis Data Mikro
- Modul Analisis Intervensi & Penganggaran
- Kanvas Analisis kebijakan berbasis data
- Pengajuan Hak Akses SEPAKAT

HARAPAN DAN TINDAK LANJUT

- Keseragaman standar pemanfaatan SEPAKAT berbasis DTSEN di seluruh Kaltara
- Justifikasi kebijakan penanggulangan kemiskinan lebih kuat dan terukur
- Transformasi tata kelola pembangunan kolaboratif, adaptif, berbasis data

Modul Analisis Intervensi & Penganggaran membantu peserta menghubungkan hasil analisis dengan perumusan program, kegiatan, dan alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran. Kanvas Analisis sebagai alat bantu menyusun alur berpikir analitis dan merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis data. (LO)

TRANSFORMASI INOVASI · REFORMASI BIROKRASI

Persiapkan Inovasi Terbaik untuk IGA 2026, Bapperida Selenggarakan Bimtek Inovasi Daerah

Mempersiapkan inovasi terbaik perangkat daerah menuju Innovative Government Award (IGA) 2026.

Tanjung Selor - Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penginputan Inovasi Daerah Tahun 2026 pada 20–25 Mei 2026.

Kegiatan ini dilaksanakan secara *hybrid,* tatap muka di dua ruang pendampingan dan daring via Zoom dengan jadwal yang dipetakan spesifik per bidang dan unit kerja.

6	63	3 %	IGA
HARI PELAKSANAAN	UNIT KERJA DIUNDANG	BOBOT IID DALAM TPP	TARGET NASIONAL

> *Bimtek ini bertujuan memastikan inovasi perangkat daerah memenuhi kriteria, sesuai peraturan dan standar yang berlaku, sehingga dapat mempersiapkan inovasi terbaik untuk diajukan pada Innovative Government Award (IGA) 2026.*



3 BENTUK INOVASI DAERAH

01
PELAYANAN PUBLIK

Perizinan, kesehatan, pendidikan

02
TATA KELOLA

E-Planning, e-budgeting, AdminSmart kepegawaian

03
INOVASI LAINNYA

Pekerjaan umum, lingkungan hidup, urusan daerah

4 TAHAPAN PENDAMPINGAN

1. Penyusunan Narasi — Pendampingan penulisan deskripsi inovasi yang memenuhi kriteria IGA 2026.
2. Verifikasi Substansi — Pengecekan kelengkapan dan keabsahan data pendukung inovasi.
3. Pengunggahan Dokumen — Input data ke sistem nasional terintegrasi secara akurat.
4. Pengajuan IGA 2026 — Inovasi siap bersaing di tingkat nasional

5 KRITERIA INOVASI

1. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi yang diusulkan.
2. Memberi manfaat nyata bagi daerah dan/ atau masyarakat luas.
3. Tidak mengakibatkan pembebanan atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dapat direplikasi oleh daerah atau instansi lain.

Sesuai Instruksi Gubernur Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang *One Agency One Innovation,* setiap unit pelaksana wajib menghasilkan minimal satu inovasi setiap tahun.

Kebijakan strategis ini tidak hanya sekadar menjadi himbauan, melainkan sebuah mandat wajib yang menginstruksikan bahwa setiap unit pelaksana atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi wajib menghasilkan dan mengimplementasikan minimal satu inovasi yang orisinal dan berdampak setiap tahunnya.

Kewajiban tahunan ini dirancang untuk memacu daya saing daerah, mendorong budaya kreatif dan adaptif di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), serta memastikan bahwa setiap instansi terus bertransformasi merespons dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks di era digital.

Bimtek ini menjadi sarana strategis mewujudkan mandat tersebut melalui pendampingan terstruktur dari penyusunan narasi, verifikasi substansi, hingga pengunggahan dokumen ke sistem terintegrasi, dan membangun ekosistem inovasi daerah yang transparan dan akuntabel. (AS)

MEMBANGUN EKOSISTEM INOVASI KALTARA BERDAYA SAING DAN SIAP IGA 2026

"Dengan indeks inovasi daerah yang berkontribusi 3% dalam komponen TPP ASN dan mandat One Agency One Innovation dari Ingub No. 1/2022, Bapperida berkomitmen menutup celah administratif, memperkuat validasi data, dan mendorong reformasi birokrasi melalui ekosistem inovasi yang transparan dan berdaya saing tinggi di seluruh Kalimantan Utara."

IPTEK & INOVASI DAERAH

Bapperida Gelar FGD Review Rinduk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Bersama BRIN



Tanjung Selor - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Utara menggelar *Focus Group Discussion* (FGD) Review Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) Provinsi Kalimantan Utara.

Kegiatan yang dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah provinsi, dengan tujuan memperoleh masukan substantif untuk penyempurnaan dokumen strategis pemajuan iptek daerah.

Kepala Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN, Mardyanto, menjelaskan bahwa RIPJPID (Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah) memiliki fungsi strategis untuk memperkuat ekosistem inovasi dan memastikan riset sejalan dengan kebutuhan pembangunan.

> ***"Pahami urusan masing-masing OPD sebagai fondasi pemajuan Kaltara, fokus pada outcome program dan aksi nyata."***
>
> — Bertius, S.Hut.,
> Kepala Bapperida Kaltara

Dr. Adi Suhendra, M.Sosio dari BRIN memaparkan indeks inovasi daerah serta tren perkembangan inovasi Kaltara, termasuk tema riset yang perlu diperkuat: kualitas air, kawasan industri, dan lingkungan hidup.

Diskusi interaktif menghadirkan masukan dari berbagai OPD: Dinas ESDM (konservasi air tanah), Dinas Kesehatan (pemerataan layanan kesehatan di perbatasan), dan Dinas Perikanan (riset hilirisasi produk kelautan bernilai tambah).

Dokumen RIPJPID yang telah disempurnakan akan menjadi acuan utama dalam merancang program riset dan inovasi daerah periode 2025–2029, memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, BRIN, perguruan tinggi, dan dunia usaha. Dengan peta jalan terintegrasi, Kalimantan Utara optimis mempercepat transformasi berbasis iptek guna mewujudkan visi daerah sebagai beranda depan NKRI yang maju, makmur, dan berkelanjutan. (AS)

EKONOMI KRETIF & LINGKUNGAN KOMPETISI INOVASI KALTARA 2025

Dari Kresek ke Karya: Ketika Sampah Menjadi Simbol Budaya dan Harapan Ekonomi

Dedur Indonesia membuktikan bahwa sampah plastik bukan akhir cerita — melainkan awal dari inovasi yang memberdayakan perempuan, merawat alam, dan mengangkat identitas lokal Kalimantan Utara.

69 Juta	1,3 Juta	3	5
Ton Sampah RI per Tahun	Ton Plastik Masuk Laut per Tahun	Pilar Terobosan	SDGs Didukung

01 *Greenpreneurship* dari Bulungan: Menyulap Kresek Menjadi Produk Fashion Beridentitas Lokal

Ada yang menarik dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di Bulungan, Kalimantan Utara. Dedur Indonesia, digagas oleh Oda Parwati, hadir bukan sekadar sebagai usaha daur ulang biasa. Ia adalah pernyataan bahwa generasi muda bisa menjawab krisis lingkungan bukan dengan protes, melainkan dengan karya nyata yang bernilai ekonomi dan kaya identitas budaya. Setiap tahun, lebih dari 1,3 juta ton sampah plastik Indonesia mengalir ke laut. Kantong kresek sekali pakai menjadi pelaku utama.

Di tengah angka yang mengkhawatirkan ini, Dedur memilih langkah yang tidak biasa, mengolah kresek menjadi lembaran plastik lewat teknik press, lalu menjahitnya menjadi tas fashion, dompet, dan aksesori dihiasi motif ukiran khas budaya lokal Kaltara. Yang membuat Dedur berbeda adalah tiga pilar terobosan yang saling menguatkan: pertama, *upcycling* plastik yang mengubah limbah menjadi produk fashion bernilai ekonomi; kedua, pemberdayaan perempuan terutama Ibu-Ibu TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle)* yang dilatih produksi, desain, dan menjahit; dan ketiga, pendekatan kultural dengan menghadirkan motif daerah dalam setiap produk sebagai identitas kolektif Kaltara.

> *Dedur bukan hanya bicara tentang mendaur ulang sampah. Ia bicara tentang martabat — martabat perempuan di TPS3R yang kini punya keahlian dan penghasilan, dan martabat daerah yang budayanya hadir di produk bernilai jual.*

***Upcycling* Plastik**
Kresek → lembaran plastik press → tas, dompet, aksesori fashion beridentitas lokal

Pemberdayaan Perempuan TPS3R
Pelatihan produksi, desain, & menjahit bagi Ibu-Ibu TPS3R — menambah penghasilan keluarga

Pendekatan Kultural
Motif ukiran khas daerah pada produk — ramah lingkungan sekaligus memperkuat identitas budaya

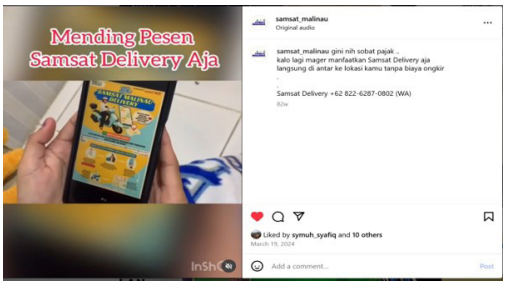
EKONOMI	LINGKUNGAN	SOSIAL BUDAYA
Peluang usaha baru, UMKM hijau berdaya saing	Kurangi plastik laut & dukung target 100% sampah 2029	Angkat nilai lokal & perkuat kolaborasi komunitas

INOVASI PELAYANAN PUBLIK KOMPETISI INOVASI KALTARA 2025

Pajak Tak Perlu Antre: *PAPA SARY Mengantar ke Depan Pintu*

Ada yang berubah dari cara warga Malinau membayar pajak kendaraan. Tidak ada lagi cerita bangun pagi, mengantre panjang di loket, atau menitipkan urusan kepada calo. Kini, cukup kirim pesan lewat WhatsApp, bayar lewat QRIS, lalu tunggu di rumah, dokumen pajak datang sendiri ke depan pintu.

Bagi sebagian orang, membayar pajak kendaraan terasa seperti tugas yang selalu bisa ditunda. Bukan karena tak mau, tapi karena mengurus sendiri ke kantor Samsat bukan perkara mudah terutama di Malinau, di mana jarak antarwilayah bisa menghabiskan setengah hari kerja. Inilah yang mendorong Dr. H. Aan Hartono, S.ST, M.Si., Kepala UPTD Bapenda Wilayah Malinau, merancang sebuah terobosan bernama PAPA SARY — singkatan dari Pelayanan Pajak Samsat Delivery.



Hasilnya tidak mengecewakan. Sejak diluncurkan Januari 2024, layanan ini menjangkau 52 unit kendaraan dengan nilai pajak Rp 95 juta lebih di tahun pertama. Memasuki 2025, angka itu melonjak, 95 unit kendaraan dan pendapatan hampir Rp 170 juta. Indeks Kepuasan Masyarakat pun meningkat dari 83,06 (2023) menjadi 86,80 (2025).

ALUR LAYANAN PAPA SARY

① Kirim foto SKPD + KTP via WhatsApp	Online
② Verifikasi & penetapan oleh petugas	Internal
③ Bayar via QRIS / COD	Fleksibel
④ Cetak SKPD & kirim ke ShareLoc WP	Delivery
⑤ Petugas antar & tanda tangan serah terima	Terverifikasi

> ***"Jika wajib pajak kesulitan datang ke Samsat, mengapa bukan Samsat yang mendatangi mereka? PAPA SARY lahir dari pertanyaan sederhana yang selama ini tidak pernah dijawab."***

SEKILAS KINERJA PAPA SARY

Jumlah kendaraan terlayani 2024	52 unit · Rp 95,03 juta
Jumlah kendaraan terlayani 2025	95 unit · Rp 169,88 juta
Jangkauan pengantaran	≤ 10 km (ojek online > 10 km)
IKM UPT Bapenda 2025	86,80 (kategori baik)

EKONOMI DAN DAYA SAING DAERAH KOMPETISI INOVASI KALTARA 2025

Bright On Kaltara: Menyalakan Identitas, Menggerakkan Ekonomi



Inovasi integrasi branding daerah dan pemberdayaan ekonomi digital-inklusif untuk meningkatkan daya saing Kalimantan Utara di kancah nasional dan global.

727.000
Penduduk di Kaltara

22 % UKM
Pakai *Platform* Digital

72 %
Konsumen Luar Kaltara Tidak Kenal Produk Lokal

3
Komunitas Koloborasi Utama

Kalimantan Utara, provinsi termuda Indonesia yang berdiri tahun 2012, menyimpan potensi ekonomi luar biasa, luas perairan 105.000 km², produksi perikanan 256.000 ton/tahun, dan 1,2 juta hektar perkebunan kelapa sawit. Namun potensi ini belum dimanfaatkan optimal. Tiga tantangan fundamental menghambatnya: lemahnya *brand identity* daerah, rendahnya literasi digital (hanya 22% UMKM aktif di platform digital), dan keterbatasan infrastruktur di wilayah perbatasan.

Inovasi *Bright On* Kaltara hadir sebagai jawaban integratif, memadukan strategi *place branding* dengan pemberdayaan ekonomi digital-inklusif. Berbeda dari branding daerah konvensional yang berhenti pada promosi visual, Bright On menjadikan branding sebagai energi kolektif yang menghidupkan ekosistem ekonomi masyarakat dari nelayan, petani, pekebun, hingga pelaku UMKM. Inovasi ini bertumpu pada dua pilar utama.

> *Bright On Kaltara mengubah branding dari sekadar citra menjadi energi kolektif yang menggerakkan masyarakat dan menyalakan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan.*

Pertama, platform digital *Bright On* Kaltara. Aplikasi inklusif yang dapat diakses bahkan di wilayah sinyal terbatas via sistem *cache offline* dengan tujuh fitur: *OnNews* (berita resmi daerah), *OnLiteracy* (edukasi perikanan, pertanian, UMKM), *OnExplore & OnCulture* (wisata & budaya), *OnEmpowerment* (info pelatihan), *OnCollaboration* (jejaring komunitas), dan *OnFeature* (kalender gelombang nelayan, kalender cuaca petani, peta UMKM).

Kedua, program pemberdayaan melalui tiga komunitas kolaborasi yang menjangkau langsung pelaku ekonomi utama Kaltara:

TANTRA	PETRA	ENTRA
Petambak & Nelayan Kaltara	Petani & Pekebun Kaltara	Entrepreneur Kaltara

KEUNGGULAN INOVASI

- Nilai Tambah Platform DIgital
- Branding + ekonomi terintegrasi
- Kolaborasi multipihak berkelanjutan
- Dapat direplikasi daerah lain

SEKILAS INFO

Sekretaris Bapperida, Syamsaimun, S.Pi, MP menerima kunjungan BPKP Kaltara terkait Evaluasi atas Tata Kelola Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Triwulan II Tahun 2026.

DTSEN merupakan basis data yang mengintegrasikan berbagai sumber data sosial ekonomi untuk mendukung perencanaan pembangunan, penyaluran bantuan sosial, serta berbagai program pemerintah lainnya. (5/5)



Kabid. Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan Dedy Irawan, SE memimpin Verifikasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan tahunan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan prioritas pembangunan daerah maupun nasional. (7/5)





Dengan mengusung tema “Pendidikan Berdaya, Ekonomi Berjaya”, BPKP Provinsi Kalimantan Utara mengemas forum diskusi dalam format Library Cafe Nepandaiyan.

Salah satu agenda utama diskusi ini adalah pemaparan Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Utara, Bertius, S.Hut terkait strategi pemerintah daerah dalam merancang pembangunan yang berpihak pada penyerapan dan pemenuhan tenaga kerja lokal. (11/6)



Kabid. Riset dan Inovasi Daerah, Dr. Mochamad Sarkawi, S.Hut., M.Eng., menghadiri rapat pembahasan kerja sama penelitian tahun 2027 bersama Tim Penelitian dan Pengembangan IPDN. Kolaborasi ini diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan daerah berbasis riset dan inovasi. (30/6)



Ketika Kurs Sampai ke Desa

Pelajaran dari Kalimantan Utara

Bagaimana USD & ringgit Malaysia Menyentuh kehidupan masyarakat desa, pedagang perbatasan dan petani pedalaman Kaltara

Retno Sawitri Listyabratarini
Perencana Ahli Pertama - Bapperida Provinsi Kalimantan Utara

Rp 16.200	Rp 3.720	70 USD/Ton	143,95 USD/Ton
USD / IDR (JUNI 2026)	MYR / IDR (JUNI 2026)	DMO Batubara Berlaku sejak 2018	HBA Batubara (23JUNI 2026)

Pagi baru saja menyingsing di Pulau Sebatik. Di sebuah warung kecil yang menghadap perairan perbatasan Indonesia–Malaysia, seorang pedagang menghitung hasil penjualannya hari itu. Di laci meja kayu tempat ia menyimpan uang, terdapat dua mata uang sekaligus, rupiah dan ringgit.

Bagi warga Sebatik, Nunukan, dan kawasan perbatasan Kalimantan Utara, ringgit bukan sekadar mata uang negara tetangga, ia adalah bagian dari denyut ekonomi sehari-hari. Mereka berbelanja, berdagang, bekerja, dan berinteraksi dengan pasar yang secara geografis lebih dekat ke Tawau, Sabah, dibanding ke kota-kota besar di Indonesia.

Di sinilah kita menemukan kenyataan menarik, meskipun masyarakat desa tidak bertransaksi menggunakan dolar Amerika Serikat secara langsung, gejolak nilai tukar mata uang asing sesungguhnya hadir dalam kehidupan mereka setiap hari.

> **"Masyarakat desa mungkin tidak memegang dolar setiap hari, namun kehidupan mereka tetap bergerak mengikuti irama yang sama dengan dunia."**

Dari Layar Bursa ke Rak Warung Desa Berkelanjutan

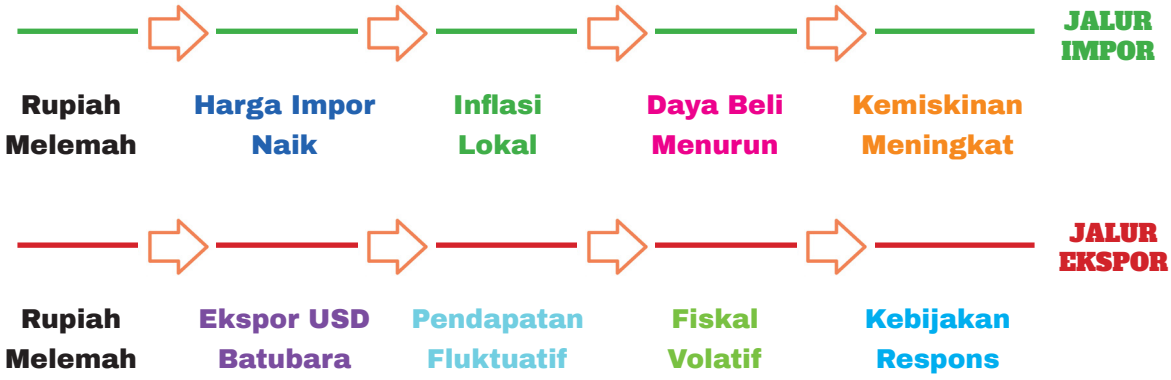
Ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah, berita itu biasanya muncul di halaman ekonomi media nasional. Angkanya bergerak naik turun di layar bursa, terlihat jauh dari kehidupan masyarakat desa. Namun jarak itu sebenarnya semu.

Provinsi Kalimantan Utara, sebagai wilayah perbatasan langsung dengan Malaysia dan pedalaman luas, menghadapi tantangan kesenjangan ekonomi tinggi. Transmisi kurs terhadap ekonomi lokal terjadi melalui beberapa jalur utama dengan indikator kunci berikut:

INDIKATOR

Kurs USD/IDR: ± Rp 16.200 (Juni 2026)
Harga Batubara Acuan: 143,95 USD/Ton — 23 Juni 2026
Harga DMO Batubara: 70 USD/Ton (berlaku sejak 2018)
Kurs MYR/IDR: ± Rp 3.720 / Ringgit

RANTAI TRANSMISI : KURS RUPIAH → EKONOMI DESA



Dua jalur transmisi: jalur impor (inflasi & kemiskinan) dan jalur ekspor (fluktuasi pendapatan daerah)

Mengapa Masyarakat Desa Merasakannya?

Di Kalimantan Utara, sebagian besar barang kebutuhan masyarakat masih harus menempuh perjalanan panjang sebelum tiba di tangan konsumen. Barang elektronik, mesin pertanian, suku cadang, pupuk, hingga material bangunan semuanya terkait rantai pasok global yang bertransaksi dalam dolar AS.

Ketika dolar menguat, biaya impor meningkat, ongkos distribusi ikut naik, dan harga barang di toko-toko desa pun bergerak. Di wilayah pedalaman seperti Malinau, Krayan, atau kawasan hulu sungai yang bergantung pada transportasi udara dan sungai, dampaknya berlipat ganda sebelum sampai ke konsumen akhir.

Ketergantungan sektor pertanian dan kebutuhan barang impor menjadikan masyarakat perdesaan sangat rentan. Pelaku usaha kecil dan rumah tangga di desa-desa terpencil merasakan efek riak kurs melalui kenaikan biaya produksi dan kebutuhan pokok.

"Seorang petani mungkin tidak pernah menukar rupiah dengan dolar. Namun ketika harga pupuk naik dan ongkos angkut panen bertambah mahal, ia sedang merasakan dampak pergerakan mata uang ribuan kilometer jauhnya."

Ketika Harga Batu Bara Menentukan Nasib Warung Kopi

Di sisi lain, dolar tidak selalu membawa kabar buruk. Kalimantan Utara bertumpu pada komoditas ekspor batu bara, kelapa sawit, dan hasil perikanan diperdagangkan menggunakan dolar. Harga Batubara Acuan (HBA) pada 23 Juni 2026 dipatok 143,95 USD/Ton untuk kalori tinggi. Kenaikan harga ini bekerja seperti pisau bermata dua, berkah bagi daerah penghasil tambang, namun tekanan inflasi bagi masyarakat luas.

Kenaikan harga batu bara seharusnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan, mendorong *multiplier effect* — serapan tenaga kerja meningkat, sektor pendukung bergairah, dan daya beli masyarakat naik. Dampaknya bisa terasa hingga ke warung kopi kecil di desa-desa sekitar kawasan tambang.

Namun kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) mematok harga batubara untuk sektor kelistrikan hanya 70 USD/Ton — jauh di bawah harga pasar. Bila DMO disesuaikan, PLN harus membeli lebih mahal, biaya produksi listrik naik, dan masyarakat menanggung risiko kenaikan tarif listrik.

> **"Peningkatan daya beli dari booming batubara mendorong kenaikan harga barang dan jasa memicu inflasi yang pada akhirnya membebani masyarakat non-tambang."**

Ringgit yang Menjadi Tetangga Sehari-hari

Jika dolar bekerja dari kejauhan, maka ringgit hadir tepat di depan mata. Bagi warga Sebatik, perbatasan negara bukanlah sekadar garis di peta ia adalah ruang hidup yang setiap hari mempertemukan dua sistem ekonomi. Selama bertahun-tahun, banyak kebutuhan pokok diperoleh dari Malaysia. Jalur perdagangan menuju Tawau lebih singkat, lebih murah, dan lebih cepat dibanding mendatangkan

DUA MATA UANG, SATU DENYUT, : EKONOMI PERBATASAN KALTARA

01
ZONA RUPIAH

Dekat dengan Tanjung Selor, Tarakan, Malinau

Harga Dipengaruhi rantai pasok nasional dan kurs USD

Inflasi lokal dari harga impor

Komoditas Ekspor : Batu bara, Kelapa sawit dan Perikanan

02
PERBATASAN

SEBATIK NUNUKAN

03
ZONA RINGGIT

Dekat dengan Tawau, Sabah

Jalur logistik lebih singkat dan murah

TKI terima gaji dalam ringgit. Dampak MYR menguat yaitu :
TKI : Pendapatan Rp Naik.
Pembeli : Barang Malaysia makin mahal

FAKTA KUNCI

MYR/IDR
RP. 3.720

BTA Kuota
RM 600/Bulan

DMO
70 USD/Ton

HBA
143,95 USD/Ton



barang dari kota-kota besar di Indonesia.

Ketika ringgit menguat, warga berpenghasilan ringgit diuntungkan karena nilai tukarnya ke rupiah meningkat. Sebaliknya, keluarga yang membeli barang dari Malaysia menghadapi harga yang lebih mahal dalam rupiah. Dalam satu kampung yang sama, ada warga yang untung dan ada yang justru menghadapi kenaikan biaya hidup, inilah wajah ekonomi perbatasan yang unik.

Border Trade Agreement: Landasan Hukum Ekonomi

Border Trade Agreement (BTA) adalah perjanjian perdagangan perbatasan yang pertama kali ditandatangani Indonesia–Malaysia pada 24 Agustus 1970. Selama lebih dari 50 tahun, aturan dasar ini tidak pernah mengalami perubahan formal, padahal dinamika ekonomi sudah berubah drastis.

Inflasi menggerus nilai RM 600, jenis kebutuhan masyarakat perbatasan meluas jauh melampaui daftar barang BTA 1970, dan perdagangan informal terpaksa terjadi karena aturan yang ketinggalan zaman. Kerentanan ekonomi di daerah perbatasan pun terus menumpuk.

Pada 8 Juni 2023 di Jakarta, Indonesia dan Malaysia resmi menandatangani pembaruan BTA setelah negosiasi panjang melalui *Joint Trade and Investment Committee (JTIC).* Pembaruan ini mencakup 60 item barang dari Indonesia ke Malaysia dan 32 item dari Malaysia ke Indonesia, dengan daftar yang bersifat dinamis *(living document)* dapat dievaluasi sewaktu-waktu tanpa menunggu puluhan tahun.

Perjanjian ini menjadi landasan hukum krusial bagi Kalimantan Utara agar ekonomi lokal berputar secara legal, masyarakat terlindungi dari gejolak kurs fluktuatif, serta pasokan logistik pokok di beranda terdepan negara tetap aman.

PERJALANAN BORDER TRADE AGREEMENT (BTA) 1970–2023

1970

BTA Pertamakali Ditandatangani

Indonesia - Malaysia

RM 600/orang/bulan

1970 - 2023

53 Tahun Tanpa Perubahan

Inflasi menggerus nilai

Perdagangan Informal Meningkat

8 JUNI 2023

BTA Diperbaharui di Jakarta

60 Item barang RI + 32 MY

Living Document / JTIC

Tonggak sejarah BTA: dari penandatanganan 1970, 50 tahun tanpa revisi, hingga pembaruan 8 Juni 2023 di Jakarta

Dari Perbatasan untuk Indonesia

Kalimantan Utara mengajarkan satu hal penting tentang ekonomi modern: tidak ada wilayah yang benar-benar terisolasi dari dinamika global. Dolar yang diperdagangkan di pasar keuangan internasional dapat memengaruhi harga pupuk di pedalaman Malinau.

Harga batu bara dunia dapat menentukan ramainya warung kopi di sekitar kawasan industri. Dan pergerakan ringgit dapat memengaruhi isi dompet keluarga-keluarga di Sebatik dan Nunukan.

> **"Stabilitas ekonomi masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kondisi lokal, tetapi oleh kemampuan daerah beradaptasi terhadap perubahan ekonomi global."**

Karena itu, memperkuat konektivitas logistik, meningkatkan penggunaan rupiah di wilayah perbatasan, memperluas akses perbankan, serta memperkuat daya saing ekonomi lokal bukan sekadar agenda pembangunan. Semua itu adalah upaya agar masyarakat Kalimantan Utara memiliki ketahanan lebih baik menghadapi gejolak ekonomi dunia.



Pada akhirnya, masyarakat desa mungkin tidak memegang dolar setiap hari. Namun kehidupan mereka tetap bergerak mengikuti irama yang sama dengan dunia. Dan di Kalimantan Utara, kisah tentang dolar dan ringgit yang sampai ke desa bukanlah teori ekonomi, ia adalah kenyataan yang hidup di pasar, warung, pelabuhan, dan rumah-rumah warga perbatasan.

We Are *The Traffic*

GORAMA (Gowes Rabu Malam) dan Hak Warga atas Kota. Ketika roda sepeda menjadi suara paling sunyi yang paling keras di jalanan Tanjung Selor.

Wahyu Atiq Widiantoro,
Peneliti Ahli Pertama - Bapperida Provinsi Kalimantan Utara



Ada satu pemandangan yang selalu menarik setiap Rabu malam di Tanjung Selor. Belasan, bahkan puluhan pesepeda bergerak bersama menyusuri ruas-ruas jalan utama kota. Lampu-lampu kecil di setiap sepeda membentuk garis cahaya yang mengalir pelan di antara lampu kendaraan bermotor. Bel sepeda terdengar bersahutan, menggantikan dominasi suara klakson yang biasanya memenuhi malam.

Pemandangan itu mungkin hanya berlangsung satu atau dua jam. Namun maknanya jauh lebih panjang daripada durasi perjalanan itu sendiri. GORAMA, singkatan dari Gowes Rabu Malam, sekilas memang tampak sebagai kegiatan olahraga bersama biasa. Orang-orang berkumpul, mengayuh sepeda, lalu kembali ke rumah masing-masing.

Akan tetapi, jika diperhatikan lebih jauh, kegiatan ini sedang menghadirkan sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekadar aktivitas fisik. Ia sedang mengubah cara kita memandang kota, mengubah cara kita memahami siapa yang berhak atas ruang jalan.

Selama ini, kita terbiasa menganggap jalan raya sebagai ruang kendaraan bermotor. Ketika sebuah ruas jalan dipenuhi mobil dan sepeda motor, kita menyebutnya kondisi normal. Sebaliknya, ketika jalan dipenuhi pesepeda dalam jumlah besar, kita menganggapnya sebagai sebuah acara atau peristiwa khusus. Padahal keduanya sama-sama menggunakan ruang publik yang sama.

"Mengapa yang satu dianggap biasa, sementara yang lain terasa luar biasa? Pertanyaan inilah yang diam-diam diajukan oleh setiap roda sepeda yang berputar setiap Rabu malam."

Pertanyaan sederhana ini pernah menjadi perhatian filsuf dan sosiolog Prancis, Henri Lefebvre, melalui gagasannya mengenai *Right to the City* — Hak atas Kota. Menurut Lefebvre, kota bukan sekadar kumpulan bangunan, jalan, atau infrastruktur. Kota adalah ruang hidup yang dibentuk oleh aktivitas warganya.

Karena itu, setiap warga memiliki hak untuk menikmati, menggunakan, sekaligus berperan dalam membentuk kota tempat mereka tinggal. Hak atas kota bukan hanya hak untuk berada di dalam kota, lebih dari itu, hak untuk menentukan bagaimana kota seharusnya bekerja bagi manusianya.

Dalam perspektif tersebut, jalan raya tidak semata-mata dipahami sebagai koridor transportasi, melainkan bagian dari ruang publik yang harus dapat diakses secara adil oleh semua pengguna jalan. Pejalan kaki, pesepeda, penyandang disabilitas, pengguna angkutan umum, hingga pengendara kendaraan bermotor, semuanya memiliki hak yang sama untuk merasa aman dan dihargai.

Dalam ilmu perencanaan kota, keberadaan pesepeda sering dijadikan salah satu indikator kualitas sebuah kota. Semakin banyak pilihan moda transportasi yang aman, nyaman, dan setara, semakin tinggi pula kualitas ruang kotanya. Keberadaan pesepeda mencerminkan bagaimana sebuah kota menghargai manusianya, bukan hanya sebagai pengemudi atau penumpang, tetapi sebagai warga yang berhak atas ruang bersama.

Makna GORAMA

"Tanpa spanduk tuntutan, tanpa demonstrasi, dan tanpa menutup jalan, puluhan pesepeda setiap Rabu malam menunjukkan bahwa ruang jalan dapat digunakan dengan cara yang berbeda. Mereka bukan mengambil hak pengguna lain. Mereka menghadirkan kembali kelompok yang selama ini nyaris tidak terlihat."

Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Utara yang sedang bertumbuh, ada jalan-jalan baru yang dibangun, kawasan permukiman yang berkembang, dan pusat-pusat aktivitas baru yang terus bertambah. Pertumbuhan tersebut tentu menjadi hal yang menggembirakan.

Namun pembangunan kota tidak hanya diukur dari bertambahnya panjang jalan atau meningkatnya jumlah kendaraan. Kota yang berhasil adalah kota yang tetap menyediakan ruang bagi interaksi sosial, kesehatan masyarakat, serta mobilitas yang berkelanjutan dan inklusif bagi semua kalangan.

MAKNA SETIAP KAYUHAN

- ***Rabu malam*** — rutinitas yang menjadi pernyataan tanpa kata
- ***Jalan raya*** — ruang publik milik semua pengguna, bukan hanya kendaraan bermotor
- ***Tanjung Selor*** — ibu kota yang sedang bertumbuh dan butuh ruang inklusif
- ***GORAMA*** — praktik sosial yang ikut membentuk wajah kota

GORAMA memperlihatkan bahwa kebutuhan tersebut sesungguhnya telah tumbuh dari masyarakat sendiri. Bukan melalui kebijakan dari atas, bukan pula melalui kewajiban, melainkan melalui kebiasaan. Kebiasaan memilih sepeda, kebiasaan menyapa sesama pengguna jalan, serta kebiasaan menikmati kota dengan kecepatan yang memungkinkan kita masih dapat melihat wajah orang lain.

Dalam konsep Henri Lefebvre, kota selalu diproduksi oleh kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembangunan kota tidak cukup hanya dilakukan melalui proyek fisik. Ia juga dibangun melalui praktik-praktik sosial yang menghidupkan ruang publik, dan GORAMA adalah salah satu praktik itu.



Mungkin bagi sebagian orang, GORAMA hanyalah agenda rutin setiap Rabu malam. Namun bagi kota, ia merupakan pengingat bahwa ruang publik tidak pernah kehilangan maknanya selama masih ada warga yang bersedia menggunakannya.

Dan setiap kali roda-roda sepeda kembali berputar di jalan-jalan Tanjung Selor, pesan itu kembali disampaikan dengan tenang tanpa perlu diucapkan dengan suara keras. ***We Are The Traffic.*** Bukan untuk menguasai jalan, melainkan sebagai pengingat bahwa jalan raya adalah ruang bersama, tempat setiap orang memiliki hak yang sama untuk hadir, bergerak, dan menjadi bagian dari kehidupan kota.

> Kota bukan milik kendaraan. Bukan pula milik pemerintah semata. Kota adalah milik seluruh warganya dan setiap kayuhan sepeda adalah pengingat akan hal itu.
>
> — Refleksi atas Henri Lefebvre, *Right to the City*

KULINER NUSANTARA

Kuliner Kaltara *Berbahan Buah* & Tanaman

Cita rasa rimba tropis yang menjelma menjadi hidangan di meja makan



Penulis : Ida Ayu Parlina[1]

78 %
Kawasan Hutan Kaltara

10
Kuliner Berbahan Alam

3
Suku Adat Benuanta

KULINER NUSANTARA

"Ingat Rendang, ingat Indonesia. Ingat Lepiu, ingat Kaltara."

Dari rimba Benuanta yang lebat, tersimpan ragam buah dan tanaman yang menjelma menjadi sajian lezat, warisan cita rasa yang patut dikenal dan dilestarikan.

Setiap daerah memiliki makanan dan minuman yang khas, ada satu daerah yang kulinernya begitu spesial sampai-sampai nama makanan tersebut tidak hanya identik dengan daerah asalnya tetapi juga negara asalnya. Contohnya adalah Rendang yang tidak hanya dikaitkan dengan Minangkabau daerah asalnya, tetapi juga Indonesia secara umum, ingat Rendang ingat Indonesia.

Kalimantan Utara tentunya memiliki menu khas, baik dari bahan baku, proses pengolahan, maupun resepnya. Namun kali ini, bukan ragam kuliner dari suku Bulungan, Tidung dan Dayak yang saya sajikan, tetapi makanan yang berbahan dasar dari buah-buahan dan tanaman dari Kalimantan, khususnya Kalimantan Utara.

Menurut Yayasan Konservasi Alam Nusantara (Kompas.com, 2025), dari luas wilayah administrasi Kalimantan Utara, sekitar 78,48 persen merupakan kawasan hutan. Rimba Kalimantan Utara yang luas itu memiliki beraneka tanaman dengan beragam manfaat, baik dalam bentuk hasil hutan kayu maupun non kayu seperti rotan, bambu, tanaman obat dan dan buah-buahan. Berikut ini beberapa buah hutan yang dapat menjelma menjadi makanan enak.

BAGIAN I

Buah-Buahan Hutan

01 Lepiu

Buah Langka Kalimantan



Bagi orang-orang dari luar Kalimantan, ada satu tanaman buah yang kemungkinan besar baru pertama kali mereka lihat ketika berada di Kalimantan Utara. Nama buah itu adalah Lepiu. Lepiu adalah tanaman yang tumbuh menumpang pada tanaman lain. Buah lepiu berada dalam bongkol yang akan terbuka secara alami saat tua dan siap dipanen. Isi buah lepiu berwarna krem, setelah matang dengan cara direbus daging buah lepiu yang empuk mengeluarkan cairan seperti minyak berwarna kekuningan yang membuat penikmat buah ini ketagihan.

Buah lepiu dijuluki buah langka karena tidak berbuah setiap tahun, kadangkala buah ini hadir kembali setelah lima tahun lamanya. Rasanya yang bikin ketagihan dan kelangkaannya membuat harga buah ini melambung tinggi. Harga perkilo dapat mencapai ratusan ribu rupiah, membuat penjual buah hutan ini meraup untung jutaan rupiah setiap kali panen. Buah lepiu begitu popular dan banyak peminatnya, kini buah lepiu dibudidayakan di perkebunan yang direkayasa semirip mungkin dengan habitat asli buah hutan ini.

02 Bambangan

Membangan



Membangan atau Bambangan adalah buah hutan yang berbentuk bulat dengan kulit tebal berwarna krem kecoklatan, ukuran buah membangan sebesar buah kelapa yang sudah dibuang kulit serabutnya. Cara mengupas buah membangan adalah dengan mengiris kulitnya tegak lurus menjadi beberapa bagian, lalu setiap irisan kulit buah yang tebal ditarik dari pangkal hingga ujungnya. Daging buahnya berwarna kuning dan berserat kasar, rasanya asam manis. Kadangkala rasa asam lebih dominan tapi jika beruntung ada juga buah membangan yang rasanya manis. Buah hutan satu ini biasa diolah menjadi sambal mentah dengan cara dicacah atau diulek. Buah yang tinggi serat ini dapat membantu melancarkan proses pencernaan.

03 Rambai

Sejenis Langsat



Selain membangan, ada buah lokal lainnya yang biasa diolah menjadi sambal yaitu buah rambai. Rambai adalah buah sejenis langsat, berbiji besar dengan rasa asam manis. Bagian dari buah rambai yang dibuat sambal adalah kulitnya. Berbeda dengan langsat apalagi duku yang berkulit tebal, rambai memiliki lulit lebih tipis dengan tekstur yang licin. Kulit rambai yang sudah diiris dan dicuci bersih siap diolah menjadi pendamping nasi dengan cara ditumis dengan bumbu dasar, cabe dan udang menjadi sambal yang memiliki rasa asam, pedas dan gurih hingga ujungnya.

Daging buahnya berwarna kuning dan berserat kasar, rasanya asam manis. Buah hutan satu ini biasa diolah menjadi sambal mentah dengan cara dicacah atau diulek. Buah yang tinggi serat ini dapat membantu melancarkan proses pencernaan.

04

Duyan

Durian Merah · Tabelak



Bagi penyuka durian, berada di Kalimantan Utara pada musim buah adalah saat memanjakan selera. Umumnya durian dapat diolah menjadi dodol yang biasa disebut lempok/ lempuk atau lingking jatu (dodol durian). Durian juga dapat dijadikan kolak, jus atau kue seperti bingka. Di Kalimantan Utara ada jenis durian yang enak dijadikan lauk pendamping nasi. Durian satu ini berwarna merah atau kecokelatan, memiliki duri panjang dan tajam, berukuran sedang tapi sulit dibuka, ciri khasnya adalah daging buahnya yang berwarna merah dengan aromanya yang berbeda dari durian biasa.

Durian merah yang hambar ini disebut Duyan atau Tabelak. Jenis durian ini cocok ditumis menjadi sambal masak, lebih praktis dari tempoyak yang membutuhkan proses beberapa hari, duyan dapat langsung dijadikan bahan lauk dalam kondisi segar.

05

Durian Kuning

Elai - Ruas



Buah elai atau ruas adalah sejenis durian dengan kulit berwarna kuning, ada yang berbentuk bulat ada juga yang lonjong dengan lima cekungan seperti belimbing bintang (biasa disebut elai belimbing). Duri buah elai agak tumpul dengan daging buah berwarna kuning atau jingga. Elai juga memiliki aroma yang tidak menyengat dengan rasa yang manis.

Daging buah elai yang dapat diolah menjadi lauk adalah buah yang masih mentah tapi sudah cukup tua, sehingga daging buah elai yang tebal dan manis memiliki tekstur yang empuk dapat dijadikan salah satu bahan sayur bening, sayur bersantan, atau sayur tumis pedas dengan ebi.

06

Pisang Muli

& Pisang Tunjuk



Umumnya selain sebagai hidangan pencuci mulut, pisang mentah dapat disulap menjadi lauk pendamping nasi yang menggugah selera, namun yang paling sering diolah menjadi sayur bening atau sayur asam adalah pisang Muli dan pisang Tunjuk. Bahan baku utama menu sayur bening ini adalah pisang muli yang masih mentah. Potongaan buah pisang yang sudah dikupas dan dibelah siap diolah bersama bumbu dasar berupa irisan bawang merah, bawang putih dan sepotong batang serai.

Bahan pelengkapnya adalah potongan ikan kering atau ikan asin gulama yang dicemplungkan selain sebagai penyedap rasa juga agar kuah tidak menjadi keruh. Selain disayur bening pisang muli mentah juga dapat dioseng dan disayur asam.

BENUANTA MEMBERI

"Sepanjang kita mau dan tahu cara mengolah bahan-bahan yang disediakan oleh alam, maka kita dapat memanjakan selera sekaligus mendapatkan nutrisi dan manfaat lainnya bagi tubuh kita."

- Ida Ayu Parlina • Penggiat Literasi

BAGIAN II

Tanaman & Umbi



07
Keladi

Buduk

Kaya karbohidrat, vitamin, mineral, serat, dan antioksidan. Umbinya bisa direbus, digoreng, jadi keripik, sayur asam, atau ditumis. Menu berbahan keladi jadi favorit Ulun Benua karena mudah didapat.

KARBOHIDRAT ALAMI



08
Umbut Kelapa

Umut Nyur — Menu Pesta Adat

Menu wajib pesta adat suku Bulungan, Tidung, dan Dayak. Diambil dari ujung batang kelapa yang ditumbang khusus saat persiapan pesta. Setelah dimasak sempurna terasa renyah seperti rebung, dengan aroma khas kelapa dan sentuhan manis alami. Kaya nutrisi, antioksidan, dan anti-inflamasi. Kelangkaannya justru membuat umbut semakin istimewa, kini orang pun melirik umbut sawit sebagai alternatif.

MENU PESTA ADAT



09
Pakis

Paku · Piyai · Rutun

Tersedia di pasar tradisional, dijual per ikat. Ada pakis hijau, pakis air (Rutun), dan pakis merah (Piyai/Paya). Diolah jadi tumis ebi, tumis pedas dengan kembang pepaya, atau urap. Begitu dicintainya pakis merah oleh orang Bulungan sampai diabadikan dalam pantun Karmina: *"Besayur aku piyai belabu kelempuri, tembalu aku diyai kila jadi bekuri."*

SAYURAN FAVORIT



10
Daun Apa

Bekai — Penyedap Rasa Alami

Jauh sebelum MSG ada, hutan Kalimantan telah menyediakan penyedap rasa alami ini. Daun Apa atau Bekai bisa digunakan segar atau kering. Versi keringnya ditumbuk halus, disimpan dalam wadah tertutup, penyedap rasa instan alami, bebas pengawet, warisan kearifan lokal Benuanta yang tak ternilai.

#bangga melayani bangsa

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Selamat dan Sukses

Kepada

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Atas Penghargaan

APRESIASI PEMERINTAH DAERAH BERPRESTASI 2026

KATEGORI PENURUNAN TINGKAT PENGANGGURAN REGIONAL KALIMANTAN

Yang diberikan oleh :

Prof. Drs. H. M. Tito Karnavian, M. A., Ph. D
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

BALIKPAPAN, 05 MEI 2026



Tertanda

BERTIUS
Kepala Bapperida
Provinsi Kalimantan Utara

#bangga melayani bangsa

BerAKHLAK

Selamat & Sukses

Kepada

Bpk. Ingkong Ala, SE.,M.Si

WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

Atas diberikannya

ANUGERAH TOKOH INSPIRATIF INDONESIA

TOKOH YANG BERKONTRIBUSI BESAR TERHADAP PERKEMBANGAN PERS NASIONAL DAN EKOSISTEM MEDIA SIBER INDONESIA

Oleh

PENGURUS PUSAT

SMSI

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

Jakarta, 18 Juni 2026

Tertanda

Bertius

Kepala Bapperida

Provinsi Kalimantan Utara





PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA